

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
TAHUN 2018 - 2023



DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Jalan Lapangan Tengah No.2 Bekasi Timur

Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI	
2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi.....	8
2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi	21
2.3 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bekasi	23
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Periode sebelumnya	29
2.5 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.....	48
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.....	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	58
3.3 Telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat.....	61
3.4 Penentuan Isu-isu Strategi.....	75
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bekasi	82
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi	83
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Dinas Pendidikan Kota Bekasi	91

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	94
BAB VII KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	123
BAB VIII PENUTUP	129

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 disusun melalui berbagai proses dan tahapan. Prosesnya antara lain adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan, partisipasi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi, serta dengan mempertimbangkan kinerja pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi hingga saat ini. Renstra telah mencoba mengakomodir semua tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat serta mengantisipasi masa depan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang akan dicapai pada periode 2018 – 2023. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi unit eselon II,III, IV dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) ; (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ; (3) Rencana / Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup pendidikan ; (5) Laporan Tahunan ; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan / stakeholder, sehingga banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Masukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan pendidikan di Kota Bekasi selama lima tahun mendatang.

Bekasi,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

H.M. ALI FAUZIE,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590413 198303 1 013



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pendidikan mempunyai peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, Pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* atau persamaan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aspek yang kedua yaitu *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia memerlukan manajemen pendidikan yang baik agar bisa menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar harapan yang diinginkan, manajemen pendidikan yang baik perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan yang sistematis dan komprehensif.

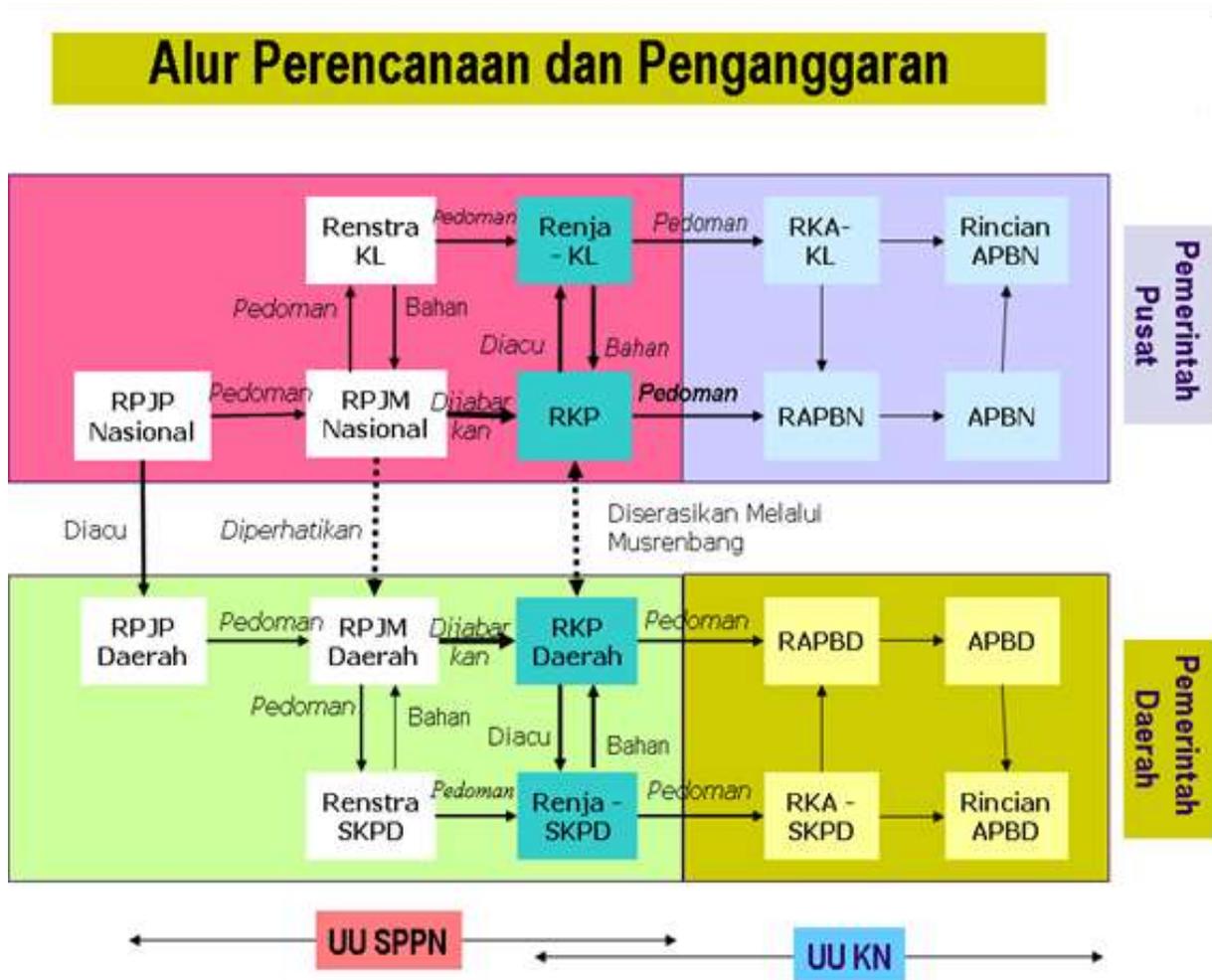
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun rencana strategis



perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu urusan pendidikan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi merupakan Program Jangka Menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2018-2023, Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Adapun kedudukan Renstra Perangkat Daerah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat digambarkan pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Kedudukan renstra Perangkat Daerah Terhadap RPJMD



Berdasarkan gambar 1 tersebut, dapat diperoleh informasi terkait dengan kedudukan dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. Sebagai acuan pelaksanaan operasional RPJMD ;
- b. Sebagai dasar dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah ;
- c. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah ;
- d. Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah ;
- e. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam hal Tata Cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah, prosesnya berdasarkan pasal 108 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah ;
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah ;
- c. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah ;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah
- e. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Perlu disadari bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah (Dinas Pendidikan), tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan perencanaan pendidikan juga seharusnya melibatkan komponen-komponen masyarakat (*stakeholders*) yang berkepentingan terhadap pendidikan

Keterlibatan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunan Renstra diperlukan guna mewujudkan sinergitas perencanaan sehingga dalam implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang termuat di dalam Renstra dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Penyelegaraan pendidikan di tingkat daerah sejatinya adalah upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka dari itu, dalam penyusunan Renstra Pendidikan di tingkat daerah harus senantiasa selaras dan bersinergi dengan kebijakan nasional pendidikan yang baik yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta Renstra Kementerian Pendidikan Nasional. RPJP Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun



untuk masa jangka waktu 20 tahun sebagai arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai Visi, Misi, dan arahan pembangunan yang disepakati bersama agar dapat bersinergi, terkoordinasi, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindakan segenap komponen bangsa. Adapun RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional yang dijadikan sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra kementerian/lembaga serta menjadi dokumen pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Melalui dokumen RPJM ini selanjutnya pemerintah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Merujuk pada dokumen tersebut, selanjutnya pemerintah daerah menyusun RPJP dan RPJM Daerah, RKP Daerah, serta RAPBD sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, termasuk di dalamnya adalah menyusun Renstra Pendidikan sebagai upaya dalam mengembangkan dan mewujudkan sumber manusia daerah yang memiliki daya saing baik di tingkat daerah dan nasional melalui penyelenggaraan pendidikan.

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Pendidikan di tingkat daerah selain sinergitas perencanaan pendidikan secara nasional juga harus bersinergi dengan kepentingan-kepentingan pembangunan daerah khususnya pada aspek Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan juga memperhatikan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen RTRW Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari dokumen RTRW yang disusun oleh provinsi dalam bentuk strategi dan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dalam penyelenggaraannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu layanan publik kepada masyarakat (public services) sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan RTRW dan KLHS agar terjadi keseimbangan dan keserasian dan



keharmonisan pembangunan antar sektor/bidang dan wilayah di Kota Bekasi secara berkelanjutan (sustainable development).

Perlunya pengkajian RTRW dan KLHS dalam penyusunan Renstra Pendidikan Kota Bekasi 2019-2023 adalah agar pembangunan pendidikan dapat dilakukan secara berkelanjutan (sustainable) sehingga dapat mengembangkan sumber daya manusia secara optimal dengan mengedepankan prinsip keselarasan lingkungan dan pembangunan wilayah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka perlu disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja
 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).;
 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Rung Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 ;
 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi ;



18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ;
19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi ;
20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Bekasi tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Umum:

Sebagai acuan strategis pembinaan dan pengembangan pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota Bekasi, dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Khusus:

Sebagai panduan teknis implementasi program pembangunan pendidikan di Kota Bekasi 2018 - 2023, meliputi Pemerataan dan Perluasan Akses, Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, serta Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bekasi.

1.4. Sistematika Pembahasan/Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Memuat informasi tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Bagian ini menyajikan informasi mengenai: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan : telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menyajikan sejumlah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah di bidang pendidikan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memuat informasi mengenai Rencana Program dan Kegiatan serta alokasi pendanaan pada setiap program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini berisi tentang sejumlah Indikator Kinerja Dinas Pendidikan pada masing-masing program dan kegiatan yang disusun selama lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sera Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
- e. membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
- f. dan Pendidikan Masyarakat.
- g. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan, membawahkan:
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan
- h. Pendidikan Masyarakat.
- i. Bidang Perencanaan dan Program, membawahkan:
 1. Seksi Data Perencanaan dan Program;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Seksi Tugas Pembantuan dan Pengembangan.



- j. UPTD;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsinya masing-masing adalah :

A. Kepala Dinas Pendidikan

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program untuk mencapai visi dan misi Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidangBidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendidikan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
 - b. menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;



- c. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang pendidikan;
- e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program;
- f. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program;
- g. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- k. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- l. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- m. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- n. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- o. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;



- p. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- q. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana
- r. dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program;
- s. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program sesuai kebijakan Wali Kota;
- t. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- u. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- v. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- w. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- x. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- y. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- z. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.



B. Sekretaris

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrative kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
 - e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
 - g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
 - a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
 - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
 - c. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;



- d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- h. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- k. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- l. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- n. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- o. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- p. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- q. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;



- r. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan public lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- x. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- bb. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- dd. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;



- ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

(4) Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

C. Bidang Pendidikan Dasar

- (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama serta guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, peningkatan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi dalam pelaksanaan sekolah dasar yang meliputi operasional pendidikan SD, akreditasi SD, standarisasi, teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kesiswaan pendidikan dasar serta kurikulum SD;
 - d. perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pembinaan, peningkatan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi dalam pelaksanaan sekolah menengah pertama yang meliputi operasional pendidikan SMP, akreditasi SMP, standarisasi, teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kesiswaan pendidikan dasar serta kurikulum SMP;
 - e. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar yang meliputi standar, kriteria, pedoman dan prosedur pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karir;



- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
- a. Seksi Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

D. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengembangan, analisa, pengawasan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang meliputi taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan PAUD;
4. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengembangan, analisa, pengawasan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat yang meliputi pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan taman bacaan masyarakat serta kursus;
5. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengumpulan, pengolahan, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan guru dan tenaga kependidikan



- pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang meliputi standar, kriteria, pedoman dan prosedur pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karir;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 8. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
1. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 2. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
 3. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 4. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 5. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
 7. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
 8. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 9. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
 10. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan public lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
 11. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;



12. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 13. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 14. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 15. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 16. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 17. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 18. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 19. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 20. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 21. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 22. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 23. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.



E. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana dan sarana sekolah dasar, prasarana dan sarana sekolah menengah pertama serta prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahan, analisa, pengusulan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan prasarana dan sarana sekolah dasar yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahan, analisa, pengusulan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan prasarana dan sarana sekolah menengah pertama yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi;
 - e. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahan, analisa, pengusulan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai uraian tugas:
 - a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
 - c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;



- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan public lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi prasarana dan sarana sekolah dasar, prasarana dan sarana sekolah menengah pertama serta prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;



- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- (4) Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan, membawahkan:
- a. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

F. Bidang Perencanaan dan Program

- (1) Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi data perencanaan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan dan pengembangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, penyusunan, pengumpulan, pengolahan penetapan, pengelolaan dan pengembangan dalam pelaksanaan data perencanaan dan program



- a. yang meliputi perencanaan teknis, standar nasional pendidikan, data pokok pendidikan, mutu pendidikan dan sistem informasi manajemen pendidikan;
 - d. perumusan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, pemantauan, pembinaan, pengoordinasian dan analisa dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, fasilitasi, pengembangan, pengoordinasian dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perencanaan dan Program mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
 - c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - b. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
 - d. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
 - e. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - f. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;



- g. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan public lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- h. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- i. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- j. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi data perencanaan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan dan pengembangan;
- k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- l. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- m. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- n. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- o. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- p. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- s. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.



- (4) Bidang Perencanaan dan Program, membawahkan:
- a. Seksi Data Perencanaan dan Program;
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Tugas Pembantuan dan Pengembangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

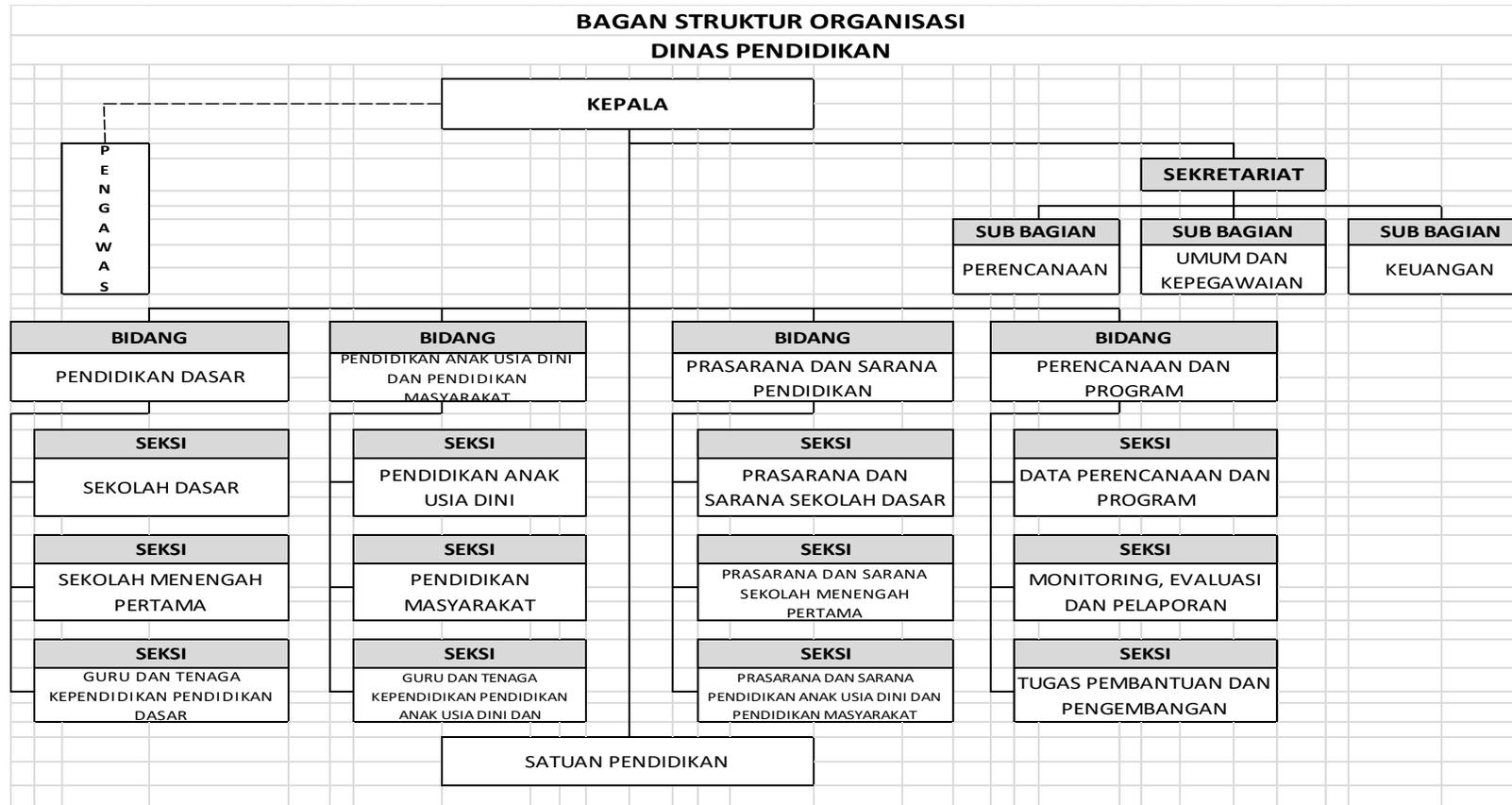
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- ii. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

2.1.1. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kota Bekasi secara kelembagaan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah sebagai Penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut





2.3. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan secara umum dapat di bagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun tenaga kerja kontrak/honorer yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPTD maupun di sekolah-sekolah. Sedangkan tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, tutor, penilik, dan pengawas yang melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sampai dengan Tahun 2018 tenaga SDM yang ada pada kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS. Dengan rincian berdasarkan jumlah, golongan ruang, latar belakang pendidikan dan gender seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		PNS	TKK	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	31	47	78
3	Bidang Pendidikan Dasar	17	18	35
4	Bidang Paud Penmas	13	11	24
5	Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan	15	18	33
6	Bidang Perencanaan Program	10	21	31
7	Pengawas SMP	34	-	34
	Jumlah Seluruhnya	121	115	236

Berdasarkan tabel 2.3.1 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Jumlah keseluruhan Personalia baik Struktural dan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjumlah 236 orang, dengan status sebagai PNS sebanyak 121 orang dan TTK sebanyak 115 orang.



Tabel 2.3.2
Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di UPTD SD,
UPTD PNFI dan SKB

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH
		PNS	TKK	
1	Kepala SKB	1	-	1
2	Staf pada SKB	3	4	7
3	Koordinator pada UPTD	12	-	12
4	Staf pada koordinator UPTD	99	159	258
5	Penilik	21	-	21
6	Pengawas SD	65	-	65
	Jumlah Seluruhnya	202	162	364

Berdasarkan Tabel 2.2.2 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa jumlah keseluruhan Personalia Struktural dan Fungsional di Koordinator UPTD SD, PNFI dan SKB, berjumlah 364 orang, dengan yang sudah berstatus PNS sebanyak 202 orang dan TKK sebanyak 162 orang. Sedangkan untuk jumlah personalia berdasarkan golongan, eselon, pendidikan dan gender dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.3
Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan
Berdasarkan Golongan, Esselon, Pendidikan dan Gender

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Golongan	236	
	Golongan IV	52	
	Golongan III	53	
	Golongan II	16	
	TKK	115	
2	Eselon	236	
	Eselon II	1	
	Eselon III	5	
	Eselon IV	15	
	Fungsional	38	
	Staf	177	
3	Pendidikan	236	
	S3	2	
	S2	45	
	S1	105	
	Diploma III	19	



No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	Diploma II	2	
	< SLTA	63	
4	Jenis Kelamin	236	
	Laki-laki	140	
	Perempuan	96	

Adapun asset yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.4.
Asset Barang Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2018

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		KET.
			BAIK	KURANG BAIK	
1	Meja Kerja Kabid/ Kasie/ Kasubbag	13 unit	12	1	
2	Meja Kerja Staff	214 buah	211	3	
3	Meja Rapat	3 set	3		
4	Mimbar Pidato	1 unit	1		
5	Kursi Kerja Kabid/ Kasie/ Kasubbag	19 unit	19		
6	Kursi Kerja Staff	178 buah	178		
7	Kursi Rapat	377 buah	377		
8	Kursi Tamu	16 buah	15	1	
9	Sofa Tamu	4 set	4		
10	Lemari besi	37 buah	34	3	
11	Lemari kayu	41 buah	40	1	
12	Filling Kabinet besi	25 buah	24	1	
13	Rak Besi/Metal	1 buah	1		
14	Rak Kayu	4 buah	2	2	
15	P.C Unit	88 unit	88		
16	Lap Top	5 unit	5		
17	Printer	31 unit	29	2	
18	Alat Penghancur Kertas	7 unit	7		
19	Alat Pemadam Kebakaran	4 buah	4		
20	AC	36 buah	36		
21	Kipas Angin	13 buah	13		
22	Televisi	4 unit	4		
23	Jam dinding	5 unit	5		
24	Telephone	1 unit	1		
25	Telephone Antar Ruang	5 unit	5		
26	Alat Pembersih Lain-lain	1 buah	1		
27	Dispenser	2 buah	2		



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		KET.
			BAIK	KURANG BAIK	
28	Infocus	3 buah	3		
29	Gbr Presiden & Wkl Presiden	5 pasang	5		
30	Gambar Garuda	3 buah	3		
31	Sound System	6 buah	6		
32	Wireless	3 buah	3		
33	Karpet	7 set	7		
34	Amplifier	1 buah	1		
35	Micropon	2 buah	2		
36	White Board	2 buah	1	1	
37	Vertical Blind	7 set	6	1	
38	Breket	1 buah	1		
39	Server	5 unit	5		
40	Hub	1 buah	1		
41	Handy Talky	8 unit	8		
42	Bingkai Kalender Pendidikan	1 buah	1		

Kondisi jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.5
Rekapitulasi Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NO	URAIAN	BUTUH	ADA	LEBIH	KURANG
1	Jenjang SMP				
	Pengawas SMP	27	33	6	
	Pendidikan Agama	149	149	0	0
	PKN	149	132		17
	Bahasa Indonesia	299	251		48
	Matematika	249	242		7
	IPA	249	231		18
	IPS	199	210	11	
	Bahasa Inggris	199	222	23	
	Seni Budaya	149	108		41
	Penjaskes	149	139		10
	Keterampilan /TIK	99	75		24
	Bahasa Daerah	99	70		29
Bimbingan dan Konseling	306	195		111	



NO	URAIAN	BUTUH	ADA	LEBIH	KURANG
2	Jenjang Sekolah Dasar (SD)				
	Pengawas SD	74	58		16
	Guru Kelas	5.191	4.898		293
	Guru PAI	415	577	162	
	Guru Penjas	415	482	67	
	Guru Bahasa Daerah	415	133		282
	Guru SBK	415	49		366
	Jumlah	9.247	8.254	269	1.262

Berdasarkan Tabel 2.3.5 tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kelebihan untuk tenaga pendidik (guru) maupun kependidikan, yaitu:

- a. Pengawas SMP, sebanyak 6 orang;
- b. IPS, sebanyak 11 orang;
- c. Bahasa Inggris, sebanyak 23 orang;
- d. Guru PAI, sebanyak 162 orang;
- e. Guru Penjas, sebanyak 67 orang;

Sedangkan untuk bidang-bidang yang lainnya, masih terdapat kekurangan tenaga pendidik (guru) yang signifikan. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian utama bagi dinas pendidikan kota Bekasi untuk mampu memenuhi standar kecukupan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Kota Bekasi.

Selain sumber daya yang tersedia dan tupoksi, sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit kerja dibutuhkan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir, untuk memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Berikut ini disajikan judul dan jenis SOP yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi .

**BAGAN 2****Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Kota Bekasi**

NO	BIDANG/BAGIAN	NAMA SOP
1	SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none">a) Pencairan Gantiu Uang Persediaan (GU/UP)b) Pencairan Gaji dan Tunjangan PNSc) Pencairan Gaji Tenaga Kontrak Kejar dan Tenaga Kependidikand) Pengajuan SPP/LS barang dan jasae) Pencairan Tambahan Uang Persediaanf) Mutasi GTK/TKK antar sekolahg) Mutasi Guru PNSDh) Penetapan Penerima Aneka Tunjangan Guru PNSD
2	BIDANG RENPROG	<ul style="list-style-type: none">a) Penerbitan kartu NUPTKb) Penerbitan sertifikat NPSNc) Penerbitan NISNd) Penyusunan Renstrae) Penyusunan Renjaf) Penyusunan LKIPg) Penyusunan SAKIP
3	BIDANG DIKDAS	<ul style="list-style-type: none">a) Pengembangan keprofesian berkelanjutan Guru melalui KKG/MGMPb) Sertifikasi Guruc) Seleksi Calon Kepala Sekolahd) Seleksi Calon Pengawas Sekolahe) Tata cara pengajuan usulan BSM SMP/MTs Swastaf) Tata cara permohonan mutasi keluar siswa SD/SMPg) Tata cara penerbitan surat rekomendasi mutasi bagi tenaga kependidikan dan tenaga pendidik
4	BIDANG PAUD DIKMAS	<ul style="list-style-type: none">a) Izin rekomendasi pendirian dan Heregistrasi Taman Kanak Kanakb) Keterangan Pengganti Ijazah Kesetaraan Paket A,B,Cc) Ijin Pendirian dan Heregistrasi PAUD (KB,SPS, TPA)d) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD



NO	BIDANG/BAGIAN	NAMA SOP
		<ul style="list-style-type: none">e) Pemeriksaan Legalisir Ijazah Kesetaraan Paket A,B,Cf) Keterangan Ralat Kesalahan pada Ijazah Kesetaraan Paket A,B,Cg) Penerbitan Ijin Pendirian dan Heregistrasi Lembaga Non Formal (PKBM,LKP, dan TBM)h) Ujian Sekolah Paket A/ULA, Ujian Nasional Paket B/WUSTHA dan Paket C
5	BIDANG SARPRAS	<ul style="list-style-type: none">a) Penyusunan Peraturan Walikota Standar Sarana Prasarana Pendidikanb) Penyusunan Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikanc) Penyusunan Petunjuk Teknis Analisis Standar Sarana Prasarana Pendidikand) Penyusunan SK. Penerima Bantuan APBD Pengadaan Barang dan Jasa

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Periode Sebelumnya

Kontribusi capaian indeks pendidikan terhadap IPM Kota Bekasi adalah sebesar 90.34% dengan demikian pada gilirannya Indeks Pendidikan Kota Bekasi yang cukup tinggi tersebut, telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian Indeks Pendidikan Jawa Barat, yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

Besarnya Indeks Pendidikan ditentukan oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata – rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan data terakhir, angka buta huruf di Kota Bekasi mencapai 23.348 jiwa dari jumlah penduduk 2.334.871 jiwa, atau sebesar 0,01 % dari jumlah seluruh penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa angka melek huruf (AMH) Kota Bekasi telah mencapai 99,99%. Pada sisi lain, Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bekasi telah mencapai indeks 10,7. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kota Bekasi sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat SMA kelas 2. Rata-rata Lama Sekolah merupakan pencerminan sejauh mana masyarakat Kota Bekasi mengikuti dan menempatkan pendidikan baik formal maupun non formal. Target yang harus dicapai adalah penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Tahun 2008 dan rintisan Wajar Pendidikan 12 tahun. Adapun perkembangan IPM,



Indeks Pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1.
IPM, INDEKS PENDIDIKAN, RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS),
DAN INDEKS RLS KOTA BEKASI
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	IPM	77,67	78,84	79,63	79,95	80,30	
2	Indeks Pendidikan	89,80	72,03	72,80	73,36	73,96	
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.2	13.28	13.36	13.47	13,51	
4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,85	10,55	10,71	10,78	10,93	

Sumber: *Indek Pembangunan Manusia, Satlak PPK-IPM, BPS Kota Bekasi, dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.*

Peningkatan IPM dan Indeks Pendidikan beserta indikatornya yaitu HLS dan RLS baik secara langsung maupun tidak langsung ditunjang oleh program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi yaitu melalui program penyetaraan Paket A, B, dan C, juga peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah harus terus menerus dilakukan. Selain itu juga ditunjang oleh adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.2 dibawah ini



Tabel 2.4.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Program Pendidikan Anak Usia Dini																		
1	Daya tampung lembaga Pendidikan Anak Usia Dini		50		42	44	46	48	50	61,66	76,11	79,72	51,47	37,8	1,47	1,73	1,73	1,07	0,76
2	Guru PAUD yang memenuhi kompetensi dasar				22	23	24	25	26	22,00	95,58	44,78	41,56	18,96	1,00	4,16	1,87	1,66	0,73
3	Rasio Guru : Siswa PAUD				10	9	8	7	6	10,00	16,00	8,8	8	7	1,00	1,78	1,10	1,14	1,17
4	Jumlah TK Negeri				2	3	4			1,00	1,00	2			0,50	0,33	0,50		
	Program Wajib Belajar 12 tahun																		
5	APK SD/MI				113,44	114,12	114,65			121,65	121,88	120,77			1,07	1,07	1,05		



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -						
					100	99,90	99,95			99,99	99,99	106,63			1,00	1,00	1,07		
6	APM SD/MI		99,95		100	99,90	99,95			99,99	99,99	106,63			1,00	1,00	1,07		
7	Angka Putus Sekolah SD/MI		0,1		0,12	0,11	0,10			0,02	0,01	0,01			0,17	0,09	0,10		
8	Daya Tampung SD/MI (Negeri+Swasta)				92	93,5	95			93,00	121,88	112,88			1,01	1,30	1,19		
9	Daya Tampung SD/MI (Negeri)				77	78	79			78,00	80,76	73,65			1,01	1,04	0,93		
10	APK SMP/MTs				93,23	93,94	94,48			87,91	92,54	114,33			0,94	0,99	1,21		
11	APM SMP/MTs		92,64		91,4	92	92,64			86,14	91,61	112,40			0,94	1,00	1,21		
12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,11		0,13	0,12	0,11			0,03	0,01	0,02			0,23	0,08	0,18		
13	Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta)				71,5	73	74,5			73,00	92,54	91,44			1,02	1,27	1,23		
14	Daya Tampung SMP/MTs (Negeri)				56	57	58			57,00	43,75	40,67			1,02	0,77	0,70		
15	APK SMA/MA/SMK				73,75	74,18	75,89			86,36	92,14	98,61			1,17	1,24	1,30		
16	APM SMA/MA/SMK				71,94	72,89	73,63			84,18	90,30	90,17			1,17	1,24	1,22		



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
17	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK				0,46	0,44	0,46		0,03	0,13	0,02		0,07	0,30	0,04		
18	Daya Tampung SMA/MA/SMK (Negeri+Swasta)				60	61,5	63		65,00	92,14	101,77		1,08	1,50	1,62		
19	Daya Tampung SMA/MA/SMK (Negeri)				41	41,5	42		45	28,36	32,45		1,10	0,68	0,77		
20	Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1: 32) Negeri+Swasta				36	35	34		36	36	41		1,00	1,03	1,21		
21	Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1: 32) Negeri				36	35	34		36	40	56,20		1,00	1,14	1,65		
22	Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta				39	38	37		39	39	44		1,00	1,03	1,19		
23	Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri				40	39	38		40	40	59,10		1,00	1,03	1,56		
24	Rasio siswa SMA : ruang				39	38	38		39	39	31,48		1,00	1,03	0,83		



N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
	kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta																
25	Rasio siswa SMA : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri				40	39	38		40	40	41,88			1,00	1,03	1,10	
26	Rasio siswa SMK : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta				37	35	34		37	37	44,31			1,00	1,06	1,30	
27	Rasio siswa SMK : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri				36	35	34		36	36	53,38			1,00	1,03	1,57	
28	Ruang kelas SD/MI sesuai standar (Negeri)				77	78	79		76	32,8	87,65			0,99	0,42	1,11	
29	Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar (Negeri)				80	81	82		79	29,4	95,18			0,99	0,36	1,16	
30	Ruang kelas SMA/SMK/MA sesuai standar (Negeri)				91	92	93		92	60,13	97,77			1,01	0,65	1,05	



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
31	Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs		93,89		93,5	93,66	93,89			78,69	80,32	95,33			0,84	0,86	1,02		
32	Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan				91,45	92,18	93			99,74	94,30	99,78			1,09	1,02	1,07		
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah																		
33	Kelulusan UN SMA/MA/SMK				100	100	100			100	100	100			1,00	1,00	1,00		
34	Rerata UN SMA				8	8,1	8,2			8	6,03	6,00			1,00	0,74	0,73		
35	Rerata UN SMK				7,9	8	8,1			7,9	8,06	5,89			1,00	1,01	0,73		
36	Jumlah Laboratorium Biologi di SMA/SMK (Negeri dan Swasta)				62	64	66			62	87,1	43,33			1,00	1,36	0,66		
37	Jumlah Laboratorium				62	64	66			62	90,32	43,33			1,00	1,41	0,66		



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
	Fisika di SMA/SMK (Negeri dan Swasta)																
38	Jumlah Laboratorium Kimia di SMA/SMK (Negeri dan Swasta)				62	64	66		62	88,17	20,47		1,00	1,38	0,31		
39	Jumlah Laboratorium Komputer di SMA/SMK (Negeri)				71	72	73		71	121,51	68,37		1,00	1,69	0,94		
40	Jumlah Laboratorium Bahasa di SMA/SMK (Negeri)				56	57	58		56	64,52	41,11		1,00	1,13	0,71		
41	Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMA/SMK				1,4	1,3	1,2		1,40	1,20	1,2		1,00	0,92	1,00		
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal																



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					70	75	80	85	90	70	70	90,24	86,73	90,02	1,00	0,93	1,13	1,02	1,00
42	Kualifikasi Tutor Paket A, B, C																		
43	Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi				60	62	65	67	70	60	55	3,38	4,15	8,59	1,00	0,89	0,05	0,06	0,12
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
44	Guru SD yang sertifikasi				45	46,5	48	49,5	51	45	58,46	71,79	43,43	61,48	1,00	1,26	1,50	0,88	1,21
45	Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang studi yang diajarkan		57		49	51	53	55	57	49	83,69	83,84	83,91	94,93	1,00	1,64	1,58	1,53	1,67
46	Guru SMP/MTs yang sertifikasi				57	58,5	60	61,5	63	57	69,37	69,32	75,39	57,13	1,00	1,19	1,16	1,23	0,91



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
47	Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs terhadap bidang studi yang diajarkan		82		74	76	78	80	82	74	94,47	94,51	94,62	97,03	1,00	1,24	1,21	1,18	1,18
48	Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi				49	50,5	53			49	68,33	41,92			1,00	1,35	0,79		
49	Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA terhadap Bidang Studi yang diajarkan				78	80	82			78	78,73	79,01			1,00	0,98	0,96		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																		
50	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000 SMP				0,04	0,05	0,06			0,04	0	0			1,00	0,00	0,00		



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					0,05	0,06	0,07			0,05	0	0			1,00	0,00	0,00		
51	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000 SMA/SMK																		
52	SD Terakreditasi						68	69	70			51,89	89,93	88,7			0,76	1,30	1,27
53	SMP/MTs Terakreditasi						73	74	75			71,16	77,27	77,98			0,97	1,04	1,04
54	SMA/MA Terakreditasi						73					98,92					1,36		
	SMK Terakreditasi						68					49,42					0,73		
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar																		
55	APK SD/MI							115,22	115,74				120,77	114,44				1,05	0,99
56	Angka Putus Sekolah SD/MI							0,09	0,08				0,01	0,0007				0,11	0,01
57	Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs							94,24	94,88				98,06	83,61				1,04	0,88



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -						
58	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat pendidikan SD						55	58	60			40,1	70,67	46,4			0,73	1,22	0,77
59	Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1: 32) Negeri+Swasta							33	32				37	30				1,12	0,94
60	Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD				1,5	1,40	1,3	1,2	1,1	1,5	1,3	1,3	1,19	1,3	1,00	0,93	1,00	0,99	1,18
61	APK SMP/MTs							95,32	96				103,68	96,35				1,09	1,00
62	Angka Putus Sekolah SMP/MTs							0,10	0,09				0,01	0,03				0,10	0,33
63	Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan							93,9	94,50				102,5	97,54				1,09	1,03
64	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat pendidikan						58	60	62			69,57	70,85	75,69			1,20	1,18	1,22



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH SMP	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
65	Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta							37	36				26	33				0,70	0,92
66	Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP				1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,7	1,3	1,05	1,1	1,17	1,00	0,81	0,70	0,79	0,90
67	Rerata UN SD/MI				7,8	7,9	8	8,1	8,2	7,8	7,92	7,77	72	8,11	1,00	1,00	0,97	8,89	0,99
68	Rerata UN SMP/MTs				6,8	6,95	7,1	7,25	7,4	6,8	6,27	6,62	63,43	61,34	1,00	0,90	0,93	8,75	8,29
69	Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau Nasional						10	10	10			38	74	89			3,80	7,40	8,90
70	SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)				54	56	58	60	62	54	12,35	30,55	70,96	66,52	1,00	0,22	0,53	1,18	1,07
71	SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan atau				50	53	55	58	60	50	4,07	34,52	36,43	36,69	1,00	0,08	0,63	0,63	0,61



N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Komputer (Negeri)	TARG ET NSPK	TARG ET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
72	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)				54	56	58	60	62	54	61,52	60,79	70,37	72,68	1,00	1,10	1,05	1,17	1,17
73	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri)				50	53	55	58	60	54	50,9	50	60,95	64,99	1,08	0,96	0,91	1,05	1,08
74	Angka kelulusan UASBN		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
75	SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya				36	39	42			36	88,66	88,71			1,00	2,27	2,11		
76	Sarana dan Prasarana TIK SD/MI (Negeri)				46	49	52			46	50,45	30,04			1,00	1,03	0,58		



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					67	69	71	74	77	67	58,63	71,86	67,35	71,1	1,00	0,85	1,01	0,91	0,92
77	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)				67	69	71	74	77	67	58,63	71,86	67,35	71,1	1,00	0,85	1,01	0,91	0,92
78	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)				65	68	70	72	75	65	80,49	69,39	78,86	72	1,00	1,18	0,99	1,10	0,96
79	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)				67	69	71	74	77	67	77,11	75	77,86	72,45	1,00	1,12	1,06	1,05	0,94
80	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri)				65	68	70	72	75	65	80,49	69,39	77,55	83,67	1,00	1,18	0,99	1,08	1,12
81	Sarana dan Prasarana TIK SMP/MTs (Negeri)				61	62	63			61	68,54	53,66			1,00	1,11	0,85		



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -					
82	APM SD/MI						99,99	99,99				105,46	97,27				1,05	0,97
83	Daya Tampung SD/MI (Negeri+Swasta)						96,5	98				128,15	112,83				1,33	1,15
84	Daya Tampung SD/MI (Negeri)						80	81				83,33	67,96				1,04	0,84
85	Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri						33	32				52,45	33				1,59	1,03
86	APM SMP/MTs						93,18	93,68				84,09	83,82				0,90	0,89
87	Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta)						76	77,5				93,43	84,72				1,23	1,09
88	Daya Tampung SMP/MTs (Negeri)						59	60				40,79	37,69				0,69	0,63
89	Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri						37	36				29,4	40				0,79	1,11
90	Ruang kelas SD/MI sesuai standar (Negeri)						80	81				88,25	90,81				1,10	1,12



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -					
91	Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar (Negeri)						83	84				97,44	94,52				1,17	1,13



Dari tabel 2.4.2. di atas, dapat diperoleh informasi bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam kurun tahun 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Prioritas program pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bekasi Tahun 2013-2018 lebih menekankan pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta kecukupan tenaga pendidik dengan peserta didik. Peningkatan daya tampung lembaga PAUD secara umum dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik. Pemenuhan kompetensi guru PAUD dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik. Jika melihat pada angka rasio capaian, capaian tertinggi adalah pada tahun 2015 dengan 95,58% (4,16). Rasio guru dengan siswa PAUD berdasarkan data yang ditunjukkan secara target capaian dapat direalisasikan dengan baik. Pendirian TK Negeri berdasarkan target capaian belum dapat terealisasi sepenuhnya. Dari jumlah yang ditargetkan, hanya setengah dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, karena berdasarkan evaluasi RPJMD indikator pendirian TK Negeri dihapus/ditiadakan. Angka partisipasi PAUD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuatif yang sangat signifikan, hal tersebut disebabkan perhitungan usia PAUD yang semula dihitung antara usia 4-6 tahun, di tahun ke 4 dihitung usia 0 – 6 tahun sehingga angka partisipasinya menurun dari tahun ke tiga. Untuk meningkatkan angka partisipasi anak usia PAUD 0-6 tahun perlu sosialisasi yang terpadu disemua lini, masyarakat perlu diberikan pemahaman akan pentingnya memperhatikan Usia Emas (Golden Age) dimana pada usia PAUD anak akan tumbuh dengan maksimal. Pendirian TK Negeri juga sangat diperlukan di setiap Kecamatan agar menjadi acuan bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya bagaimana menyelenggarakan PAUD yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, juga untuk menampung anak usia PAUD dari keluarga tidak mampu. Pemerintah Daerah perlu mendorong biaya operasional bagi lembaga-lembaga PAUD yang dikelola oleh masyarakat, sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang menyekolahkan putra/putrinya ke lembaga PAUD yang ada. Demikian pula untuk tenaga pendidik PAUD minimal memiliki kualifikasi pendidikan S1 PAUD, dimana dialokasikan Bea Siswa bagi guru-guru PAUD yang belum berkualifikasi S1 PAUD untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, sehingga diharapkan



dengan guru-guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan, proses pembelajaran dapat lebih berkualitas.

Faktor lain yang menjadi kendala tidak tercapainya target tersebut diantaranya adalah karena minimnya dana yang dimiliki pemerintah serta dukungan secara kebijakan yang belum memadai. Diharapkan pada periode Renstra selanjutnya, target dapat tercapai sehingga pola pembinaan pada jenjang pendidikan TK dapat terwujud dan kualitas pelayanan pendidikan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

II. Program Wajib Belajar 12 Tahun

Berdasarkan realiasi capaian program yang ditunjukkan pada tabel 2.2.7 diatas, sejumlah program Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2013 - 2018 yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan Renstra periode selanjutnya (2018 – 2023) diantaranya:

- a. Angka Putus Sekolah SD/MI
- b. Daya Tampung SD/MI (Negeri)
- c. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
- d. Daya Tampung SMP/MTs (Negeri)
- e. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
- f. Daya Tampung SMA/MA/SMK (Negeri)
- g. Rasio siswa SMA : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri dan Swasta
- h. Ruang kelas SD/MI sesuai standar (Negeri)
- i. Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar (Negeri)

Program-program tersebut perlu direalisasikan pada periode Renstra selanjutnya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kota Bekasi yang telah ditetapkan. Pada periode Renstra selanjutnya, fokus pencapaian Dinas Pendidikan Kota Bekasi menitikberatkan pada upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan berkualitas di tingkat pendidikan dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs), tidak lagi menitik beratkan pada pendidikan menengah (SMK/SMA/MA). Hal ini tentukan memberikan kesempatan yang lebih bagi Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendorong pada pencapaian APK dan APM sehingga tidak ada lagi siswa yang putus sekolah melalui upaya peningkatan daya tampung sekolah. Masih adanya siswa yang putus sekolah di wilayah Kota Bekasi salah satu faktor penyebabnya adalah kesadaran masyarakat yang



belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan bagi anak di masa yang akan datang serta faktor ekonomi masyarakat.

III. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah

Program ini lebih menekankan pada penguatan sarana prasarana sekolah untuk menunjang kegiatan belajar yang efektif serta meningkatkan prestasi belajar serta nilai kelulusan siswa dalam Ujian Nasional. Berdasarkan realisasi capaian, ada sejumlah program yang masih harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yakni: 1) Rerata UN SMA, 2) Rerata UN SMK, 3) Jumlah Laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia.

Program Pendidikan Menengah sejak tahun 2017 dihapus dari RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2013-2018, karena alih kelola ke Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, sehingga capaian target kinerja hanya dihitung sampai dengan tahun 2016, artinya hanya dihitung selama 3 (tiga) tahun, dimana dihampir seluruh indikator masih perlu ditingkatkan dan membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

IV. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Berdasarkan realisasi capaian program Tahun 2014-2018, secara kualifikasi Tutor baik paket A, B, dan C dapat dikatakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Aspek yang perlu mendapat perhatian oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah pada akreditasi lembaga (LPK/Kursus) dimana masih banyak LPK/Kursus belum terakreditasi. Dari 225 LKP yang ada di Kota Bekasi baru 8 (delapan) LKP yang terakreditasi. Dari 51 PKBM yang ada baru 14 (empat belas) yang terakreditasi. Hal ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya yang keras dan sungguh-sungguh dari Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada lembaga-lembaga Kursus yang dikelola oleh masyarakat untuk diakreditasi, mengingat akreditasi merupakan salah satu quality control pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat agar lebih bertanggung jawab dan memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Disamping hal tersebut diperlukan pula pembinaan terhadap para instruktur yang ada pada LKP agar sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum LKP.



Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh sejumlah faktor, diantaranya: 1) minimnya tenaga penilik dan pendamping LPK/Kursus; 2) belum adanya regulasi atau kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan LPK/Kursus; 3) keterlibatan industri dalam standarisasi kompetensi lulusan LPK/Kursus belum optimal, serta 4) belum terintegrasinya program pengembangan LPK/Kursus antar instansi terkait di wilayah pemerintah Kota Bekasi.

V. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari mutu pendidik dan layanan yang dilakukan tenaga pendidik di sekolah. Sejumlah program yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 berkenaan dengan hal ini menekankan pada dua aspek penting, yakni relevansi kualifikasi dari tenaga pendidik dan profesionalisme pendidik melalui sertifikasi. Berdasarkan realisasi capaian, program-program yang perlu menjadi perhatian oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada periode selanjutnya adalah:

- a. Sertifikasi Guru SD dan SMP
- b. Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD yang memiliki kualifikasi S1 PGSD dan
- c. Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMP terhadap Bidang Studi yang diajarkan

Ketiga indikator program tersebut capaian yang sudah terealisasi dengan baik adalah kesesuaian kualifikasi pendidikan terhadap mata pelajaran yang diajarkan, yang perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada periode Renstra selanjutnya adalah indikator sertifikasi yang telah diperoleh guru baik SD maupun SMP, karena persyaratan untuk memperoleh sertifikasi bagi guru tidak mudah serta harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dimana rata-rata nilai UKB Guru di Kota Bekasi masih dibawah standar yang disyaratkan. Dari 11.697 guru SD Negeri dan Swasta baru 7.191 orang yang telah tersertifikasi, sementara itu dari 8.016 guru SMP Negeri dan Swasta, 4.152 orang sudah tersertifikasi dan 3.864 orang yang belum tersertifikasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik baik di SD maupun di SMP merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat guru merupakan ujung tombak peningkatan mutu pendidikan disamping faktor lain yang mendukung.



VI. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini menekankan pada efektivitas dan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000 dan akreditasi sekolah diharapkan layanan pendidikan yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Indikator pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ini mengalami revisi pada tahun 2016 mengingat indikator yang ditetapkan sebelumnya setelah melalui evaluasi dipandang sulit dilaksanakan dan diterapkan, sehingga indikator mengalami perubahan menjadi Akreditasi SD/SMP/SMA/SMK yang dipandang lebih obyektif dan mudah diukur. Tetapi seiring dengan alih kelola urusan Pendidikan Menengah ke Propinsi Jawa Barat, maka indikator Akreditasi SMA/SMK pun dihapus. Berdasarkan realisasi capaian indikator program tersebut menunjukkan akreditasi pada SD/SMP di Kota Bekasi sudah melebihi dari target yang ditetapkan, dari 699 SD Negeri dan Swasta yang sudah terakreditasi sebanyak 620 SD dan yang belum sebanyak 79 SD, sementara itu dari 277 SMP Negeri dan Swasta yang ada di Kota Bekasi 216 sekolah sudah terakreditasi dan 61 sekolah belum terakreditasi hal tersebut dapat terjadi disebabkan sekolah tersebut baru berdiri dan belum meluluskan siswa sebagai salah satu syarat untuk di akreditasi. Pelaksanaan akreditasi ini perlu terus dilaksanakan mengingat akreditasi sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah, serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. . Salah satu faktor yang menjadi kendala belum tercapainya target tersebut adalah dukungan secara pembiayaan dan sistem manajemen satuan pendidikan yang belum memadai.

VII. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

Pendidikan berkualitas menjadi hak setiap peserta didik dalam pengembangan potensi, minat dan bakat yang dimiliki sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara di masa yang akan datang. Program peningkatan kualitas pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2013-2018 mekankan pada aspek pemerataan, akses, dan daya tampung lembaga pendidikan. Berdasarkan realisasi capaian target yang ditetapkan, masih terdapat sejumlah program yang perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi, diantaranya :

- a. Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs



- b. Rasio Ruang Kelas : Rombel SD
- c. Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP
- d. Rata-rata Nilai UN SMP/MTs
- e. SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)
- f. Daya Tampung SD/MI (Negeri)
- g. APM SMP/MTs
- h. Daya Tampung SMP/MTs (Negeri)
- i. Rasio Rombel : siswa SMP (SPM 1 : 36) Negeri
- j. SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)

Dari 35 indikator Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar ada 10 indikator yang belum sepenuhnya mencapai sesuai target yang ditetapkan, hal tersebut membutuhkan prioritas dalam penanganannya mengingat indikator yang belum mencapai target tersebut adalah indikator yang cukup vital mempengaruhi kualitas layanan pendidikan pada umumnya. Misalnya angka melanjutkan lulusan SD/MI ke SMP/MTs dari 44.873 lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs sebanyak 37.517 orang, ada 7.356 siswa yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs, hal tersebut kemungkinan siswa yang bersangkutan bukan penduduk Kota Bekasi tetapi bersekolah di Kota Bekasi sehingga setelah lulus SD kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Atau siswa tersebut dibawa orangtuanya pindah ke kota lain. Untuk rasio ruang kelas dengan rombel pada SD dan SMP mayoritas masih ada sekolah yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar double shift, artinya satu ruang kelas diisi oleh dua atau lebih rombongan belajar. Nilai rata-rata UN SMP sebesar 61,34 masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 63,43. Sementara prasarana laboratorium IPA dan atau Komputer yang dimiliki oleh SD dan SMP Negeri belum seluruhnya terpenuhi, hal tersebut disebabkan keterbatasan ruangan walaupun ada ruangan dipakai ruang kelas untuk pembelajaran. Daya tampung pada SD sebanyak 67,96 % dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun ditampung di 417 SD Negeri di Kota Bekasi, sisanya sebanyak 32,04 % ditampung di 282 SD Swasta dan apabila dihitung daya tampung pada SD Negeri dan Swasta sudah lebih dari 100 % artinya di SD Swasta masih banyak ruang kelas yang kosong, sehingga perlu dilakukan penataan pada SD Negeri yang sudah tidak efisien, yang masih melaksanakan KBM dua shift bahkan tiga shift karena keterbatasan ruang kelas melalui upaya merger /penggabungan dengan harapan kualitas pembelajaran dapat meningkat dan pengelolaan sekolah menjadi efektif dan efisien. Sementara daya



tampung pada SMP Negeri baru mencapai 37,69 % dari seluruh siswa lulusan SD/MI, dan daya tampung pada SMP Negeri dan Swasta baru mencapai 84,72 % artinya masih ada 15,28 % lulusan SD/MI yang tidak tertampung baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Melihat kondisi ini Pemerintah Daerah perlu mengupayakan penembahan daya tampung pada sekolah negeri dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP terutama di Kecamatan/Kelurahan yang belum tersedia SMP Negeri dengan tetap memperhitungkan jumlah lulusan SD/MI yang ada di wilayah tersebut serta memperhitungkan keberadaan sekolah swasta. Untuk APM SMP sebesar 83,82 % belum memenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 84,09 % kondisi ini membutuhkan perhatian yang cukup serius karena masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain siswa lulusan SD banyak yang berasal dari luar Kota Bekasi sehingga setelah lulus mereka melanjutkan di daerahnya masing-masing, atau siswa yang bersangkutan dibawa pindah ke daerah lain, atau siswa tersebut masuk pesantren yang tidak menyelenggarakan sekolah umum. Namun apapun yang terjadi Pemerintah Daerah wajib mendorong seluruh penduduk usia 13-15 tahun untuk bersekolah mengingat Wajib Belajar 12 tahun yang telah dicanangkan, dan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) yang telah digulirkan sehingga masuk sekolah tidak lagi dipungut biaya (gratis). Juga perlu didorong peran pendidikan luar sekolah melalui pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif bagi penduduk yang tidak mempunyai kesempatan masuk pada jalur pendidikan formal dengan berbagai macam kendala/hambatan.

Program-program tersebut belum sepenuhnya terealisasi dengan baik sesuai target capaian yang ditetapkan dikarenakan faktor seperti: 1) belum optimalnya kegiatan sosialisasi pentingnya pendidikan ke masyarakat; 2) dana bantuan pendidikan/beasiswa yang belum memadai; 3) minimnya dana yang dimiliki untuk perbaikan dan penambahan sarana prasarana pendidikan, serta 4) minimnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi memandang perlu program-program yang belum terealisasi tersebut sebagai program prioritas pada periode Renstra selanjutnya.



Adapun alokasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam kurun waktu 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam table T-C 24 sebagaimana tercantum dibawah ini :



TABEL T - C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NO	URAIAN / PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
		1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.229.351.500	37.026.724.000	66.026.739.300	155.523.560.000	163.802.800.000	21.864.965.386	32.693.598.459	63.310.444.067	136.790.319.878	148.371.778.622	94,13	88,30	95,89	87,95	90,58
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	665.000.000	745.000.000	945.000.000	4.584.000.000	775.000.000	440.507.326	475.532.768	779.164.050	4.388.664.100	161.953.672	66,24	63,83	82,45	95,74	20,90	6.428.999.997	5.675.751.649
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	429.160.000	100.000.000	70.000.000	248.722.500	200.000.000	83.271.000	84.716.000	67.814.000	211.095.000	-	19,40	84,72	96,88	84,87	0,00	458.722.497	363.624.997
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	200.000.000	305.000.000	521.000.000	346.500.000	150.000.000	200.000.000	248.982.800	372.724.050	301.522.000	38.434.000	100,00	81,63	71,54	87,02	25,62	1.202.499.997	930.915.647
5	Wajar Dikdas 12 Tahun	224.697.218.120	347.632.810.360	226.666.972.318			139.525.416.585	199.748.890.436	203.341.213.843			62,09	57,46	89,71			574.299.782.676	403.090.104.277
6	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.969.000.000	1.125.000.000	9.102.770.000	14.800.684.000	13.774.800.000	1.014.763.657	1.035.558.500	8.460.413.220	13.590.726.171	6.344.781.000	25,57	92,05	92,94	91,82	46,06	27.783.413.997	24.355.654.088
7	Pendidikan Non Formal /In Fomal	1.350.000.000	7.695.400.000	2.870.000.000	5.450.000.000	1.852.000.000	1.250.819.000	4.309.213.600	2.504.408.000	4.970.555.000	644.323.500	92,65	56,00	87,26	91,20	34,79	16.385.799.997	11.913.041.297
8	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar		7.085.000.000	28.044.165.000	216.558.803.134	149.511.334.600		3.292.939.430	22.855.761.220	189.221.722.507	21.197.584.436		46,48	81,50	87,38	14,18	274.505.235.052	216.317.000.612
9	Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah	135.074.781.200	12.167.500.000	81.475.695.422			104.084.676.790	1.442.229.500	38.473.242.793			77,06	11,85	47,22			93.643.195.420	39.915.472.291
10	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan	30.780.200.000	25.795.000.000	28.514.250.000	39.921.980.000	23.600.000.000	26.912.991.890	23.028.683.400	21.602.709.000	38.082.038.020	224.584.000	87,44	89,28	75,76	95,39	0,95	98.951.229.997	82.758.347.217
11	Manajemen Pendidikan	13.476.250.000	16.725.000.000	6.960.263.000	3.900.000.000	1.150.000.000	7.050.666.250	3.586.174.035	5.669.938.846	2.520.705.250	251.748.000	52,32	21,44	81,46	64,63	21,89	27.815.262.997	11.827.167.728
12	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	16.378.641.700				4.678.774.112	545.481.000				1.169.593.250	3,33				25,00		
13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah	100.000.000					44.980.000					44,98						
14	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	200.000.000					189.410.500					94,71						
	JUMLAH	409.347.449.320	418.225.710.360	383.634.115.740	280.631.467.134	189.888.134.600	279.839.334.172	236.443.688.901	302.907.686.922	248.385.746.948	28.663.020.936	68,36	56,53	78,96	88,51	15,09	1.120.468.920.151	793.469.726.955



Dari tabel TC-24. tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan keterserapan anggaran yang baik pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dimana anggaran yang ada dialokasikan untuk sepuluh mata anggaran dengan rata-rata keterserapan diatas 50%. Keterserapan tertinggi terjadi pada tahun Ke-4 (tahun 2017) dengan 248.385.746.948 atau 88,51% dari anggaran yang diajukan yakni 280.631.467.134. Sedangkan keterserapan anggaran paling rendah terjadi pada tahun ke-5 (tahun 2018) dengan 28.663.020.936 atau 15,09% dari anggaran yang diajukan yakni 189.888.316.000.

Tingkat keterserapan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun dapat juga dilihat dari rasio keterserapan realisasi anggaran dimana pada tahun ke-4 (tahun 2017) menjadi tahun dengan rasio keterserapan anggaran tertinggi dengan 0,89. Sedangkan rasio keterserapan anggaran terendah terjadi pada tahun ke-5 (tahun 2018). Adapun keterserapan anggaran per tahun anggaran beserta faktor pendukung dan penghambatnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-1 (tahun 2014) tertinggi pada program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan daya serap sebesar 279.839.334.172 (94,71%) atau dengan rasio 0,95. Sedangkan daya serap anggaran terendah adalah pada Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan daya serap sebesar 545.481.00 (3,33%) atau dengan rasio 0,03.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah tingginya tingkat partisipasi peserta serta keterlibatan sejumlah *stakeholder* pendidikan dalam program tersebut. Sedangkan salah satu faktor menjadi penghambat rendahnya tingkat keterserapan anggaran pada Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan dikarenakan belum lengkapnya data kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

- b. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-2 (tahun 2015) tertinggi pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan daya serap sebesar 1.035.558.500 (92,05%) atau dengan rasio 0,92. Sedangkan daya serap anggaran terendah adalah pada program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah dengan daya serap sebesar 1.442.229.500 (11,85%) atau dengan rasio 0,12.



Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diantaranya: (1) tingginya tingkat partisipasi masyarakat; (2) keterlibatan lembaga masyarakat/yayasan dalam bentuk pendirian lembaga PAUD; (3) kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan PAUD sebagai dalam mempersiapkan anak memasuki jenjang sekolah dasar semakin meningkat; (4) komitmen Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan PAUD kepada masyarakat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kesuksesan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah diantaranya: (1) dukungan sistem informasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang belum memadai; (2) payung hukum kebijakan penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan tanggungjawab pemerintah pusat; (3) keterlibatan peran komite sekolah yang belum optimal, serta (4) minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

- c. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-3 (tahun 2016) tertinggi pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan daya serap sebesar 8.460.413.220 (92,94%) atau dengan rasio 0,93. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah dengan daya serap sebesar 38.473.242.793 (47,22%) atau dengan rasio 0,47. Sebagaimana pada tahun sebelumnya (tahun 2015).

Faktor yang mendukung keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah: (1) tingginya tingkat partisipasi masyarakat; (2) keterlibatan lembaga masyarakat/yayasan dalam bentuk pendirian lembaga PAUD; (3) kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan PAUD sebagai dalam mempersiapkan anak memasuki jenjang sekolah dasar semakin meningkat; (4) komitmen Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan PAUD kepada masyarakat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kesuksesan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah diantaranya: (1) dukungan sistem informasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang belum memadai; (2) payung hukum kebijakan penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan tanggungjawab pemerintah pusat; (3) keterlibatan peran komite sekolah yang belum optimal, serta (4) minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.



- d. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-4 (tahun 2017) paling tinggi pada program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan daya serap sebesar 2.520.705.250 (95,39%) atau dengan rasio 0,95. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Manajemen Pendidikan dengan daya serap sebesar 38.082.038.020 (64,63%) atau dengan rasio 0,65.

Keberhasilan pelaksanaan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan dikarenakan oleh sejumlah faktor diantaranya: (1) kesadaran tenaga pendidik dan kependidikan akan profesinya; (2) tingkat keikutsertaan tenaga pendidik dalam program sertifikasi guru yang tinggi; (3) keterlibatan pihak industri dalam kegiatan magang pada guru produktif; (4) efektivitas sosialisasi program peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan oleh Dinas Pendidikan; (5) tingginya partisipasi tenaga pendidik dan kependidikan dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan; (6) adanya program guru, siswa, dan pengawas berprestasi yang menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Adapun sejumlah faktor yang menghambat keberhasilan program Manajemen Pendidikan diantaranya: (1) belum efektifnya penerapan ISO 9001-2008 di lingkungan Dinas Pendidikan; (2) dukungan sumber daya manusia dalam kegiatan Akreditasi sekolah; (3) penerapan sistem PPDB yang belum optimal; (4) daya dukung infrastruktur Dinas Pendidikan dalam penguatan layanan pendidikan terintegrasi dan terpadu.

- e. Keterserapan anggaran pada Tahun Ke-5 (2018) tertinggi pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan daya serap sebesar 6.344.781.000 (46,06%) atau dengan rasio 0,46. Sedangkan daya serap anggaran yang paling rendah adalah pada Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan daya serap sebesar 224.584.000 (0,95%) atau dengan rasio 0,01.

Sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah: (1) tingginya tingkat partisipasi masyarakat; (2) keterlibatan lembaga masyarakat/yayasan dalam bentuk pendirian lembaga PAUD; (3) kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan PAUD sebagai dalam mempersiapkan anak memasuki jenjang sekolah dasar semakin meningkat; (4) dukungan pendanaan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap peningkatan kualitas dan akses pendidikan PAUD; (5) dukungan payung hukum kebijakan penyelenggaraan PAUD baik di tingkat nasional, provinsi maupun



daerah. Adapun yang menghambat keberhasilan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan diantaranya: (1) belum optimalnya peran dan fungsi pengawas sekolah; (2) belum optimalnya peran stakeholder dalam program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Adapun perkembangan lembaga pendidikan setiap jenjang periode 2014 – 2018, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.3.

Perkembangan Jumlah Lembaga Pendidikan Lima Tahun Terakhir

No.	JENJANG	JUMLAH LEMBAGA									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	TK	1	627	1	1047	2	1046	2	774	2	774
2	RA	-	289	-	281	-	281	-	281	-	281
3	SD	447	246	442	231	421	269	420	255	417	255
4	MI	1	132	1	134	1	134	1	134	1	134
5	SMP	40	172	41	208	49	215	49	222	49	222
6	MTS	3	70	3	73	3	73	3	73	3	73
7	SMA	18	75	18	72	22	80	22	80	22	80
8	MA	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24
9	SMK	11	109	12	113	15	132	15	132	15	132
JUMLAH		523	1744	520	2183	515	2254	514	1975	511	1975

Berdasarkan perkembangan jumlah lembaga pendidikan di Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan jumlah lembaga pendidikan di Kota Bekasi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, khususnya lembaga pendidikan yang berstatus swasta, khususnya pada jenjang TK pada tahun 2015. Kondisi berbeda terjadi pada pendidikan yang berstatus negeri, tinggi minat masyarakat dalam pendidikan sampai saat ini belum dapat terakomodir sepenuhnya oleh sekolah negeri sehingga swasta mendominasi. Secara keseluruhan rasio antara sekolah negeri dengan swasta pada tahun 2014 1:3,33. Tahun 2015 rasio perbandingannya adalah 1: 4,19. Pada tahun 2016 rasio perbandingannya adalah 1:4,37. Pada tahun 2017 perbandingannya adalah 1:3,84 sedangkan pada tahun 2018 rasionya adalah 1:3,86



Berdasarkan data pendidikan perkembangan dan pertumbuhan siswa setiap jenjang baik melalui program persekolahan maupun pendidikan luar sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.4
Keadaan Jumlah Siswa Lima Tahun Terakhir

N O	JENJAN G	2014	2015	2016	2017	2018
1	PAUD	16.014	6.097	10.943	13.715	51.012
2	TK/RA	41.443	26.013	40.104	45.425	43.830
3	SD/MI	278.768	280.978	281.031	283.654	281.030
4	PAKET A	52	311	973	924	775
5	SMP/M TS	107.610	143.098	134.670	119.227	113.624
6	PAKET B	1.205	928	1.860	1.786	1.464
7	SMA/M A	39.102	38.394	46.216		
8	SMK	57.912	57.776	65.578		
9	PAKET C	3.118	1.839	3.542		
	JUMLA H	545.224	555.434	584.917	464.731	491.735

Dari data pertumbuhan jumlah siswa dalam kurun waktu tahun 2014 – 2018 terlihat peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya pada masing-masing jenjang pendidikan. Penurunan partisipasi pada jenjang TPA disebabkan karena penerapan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu syarat peserta didik memasuki jenjang Pendidikan Dasar. Selain itu, penguatan karakter keagamaan yang menjadi muatan wajib pada setiap mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler (Kurikulum 2013) menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat partisipasi masyarakat pada jenjang TPA.

Peningkatan partisipasi positif juga ditunjukkan pada pendidikan non formal dalam bentuk Paket Kesetaraan (A, B, dan C) yang pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Kondisi ini merupakan hal positif bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi



sebagai upaya dalam penguatan sumber daya manusia daerah yang memadai melalui pendidikan non formal.

Meskipun banyak program yang telah tercapai, namun masih adanya kesenjangan dalam layanan Pendidikan yang dirasakan, diantaranya: 1) akses pada setiap jenjang dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai jenjang pendidikan dasar, 2) mutu pendidikan, 3) kualitas guru dan tenaga kependidikan, 3) pengelolaan ujian nasional yang berkualitas, 4) pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, 5) penyediaan sarana dan prasanana pendidikan, serta 5) penyebaran guru yang belum merata.

2.5. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas sebagaimana yang diharapkan melalui Renstra Pendidikan Kota Bekasi 2018-2023 ini tentunya tidaklah mudah mengingat tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan semakin kompleks sebagai akibat dari dinamisasi masyarakat daerah, nasional, dan global. Sejumlah tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan dengan menelaah Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dengan sasaran menyelenggarakan pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau.
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah,
 - b. Meningkatkan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan
 - c. Meningkatkan Minat Baca masyarakat
2. Perluasan dan Peningkatan Akses Pendidikan
 - a. Kebutuhan unit sekolah baru, perbaikan dan penambahan ruang kelas baru, perpustakaan, dan laboratorium untuk meningkatkan daya tampung sekolah dan akses pendidikan;
 - b. Masih terdapat siswa putus sekolah baik dikarenakan faktor pembiayaan maupun non pembiayaan;
 - c. Diberlakukannya sistem zonasi sekolah yang berdampak pada APK dan APM;
3. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan
 - a. Kebutuhan tenaga pendidik (guru) profesional, kesesuaian kualifikasi, serta linearitas pendidikan yang dimiliki;



- b. Belum terakreditasi seluruhnya lembaga pendidikan di tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, maupun PKBM/LPK/Kursus;
 - c. Tuntutan relevansi pendidikan non-formal (PKBM, LPK, Kursus) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
 - d. Dominasi sekolah swasta menjadi kendala utama dalam pemerataan mutu pendidikan;
 - e. Optimalisasi peran dan fungsi pengawas sekolah belum optimal dalam mewujudkan kapasitas sekolah yang memadai (*school capacity*);
 - f. Keterlibatan tokoh masyarakat, budayawan, sejarawan, dan seniman dalam penguatan budaya dan nilai kearifan lokal dalam pendidikan belum optimal.
4. Layanan Pendidikan
- a. Sinergitas kebijakan dan program Dinas Pendidikan dengan instansi/dinas terkait belum terlaksana dengan baik;
 - b. Dukungan perangkat/infrastruktur ICT dalam mewujudkan Sistem Informasi Pendidikan belum dioptimalkan;
 - c. Keterlibatan komite sekolah dalam penguatan manajemen sekolah belum optimal;
 - d. Kebutuhan payung hukum kebijakan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah;

Disamping itu, tantangan lain yang juga harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai wujud implemementasi kebijakan daerah dalam RTRW dan pengembangan Lingkungan Hidup Strategis berkelanjutan Kota Bekasi diantaranya:

1. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ SMK;
2. Penataan dan/atau pengembangan kawasan pendidikan tinggi (perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi dan yang sederajat) eksisting maupun baru di PPK dan koridor jalan Jatiwaringin; dan
3. Penggabungan sarana pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana pendidikan pada satu kompleks sarana pendidikan secara bertahap.
4. Permasalahan lingkungan hidup yang perlu penanganan secara optimal, diantaranya:
 - a) banjir yang terjadi hampir lebih dari sebagian kecamatan;
 - b) kemacetan pada jalan-jalan protokol akibat banyaknya kendaraan yang ada tidak diimbangi dengan ruas



jalan yang dimiliki; c) kekurangan air bersih/minum pada beberapa wilayah mengingat belum seluruh wilayah mendapat layanan perpipaan (PDAM); d) sampah yang diakibatkan oleh adanya TPA Bantargebang dan Sumurbatu; e) kawasan kumuh; f) alih fungsi lahan yang disebabkan pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan; g) polusi udara akibat volume kendaraan dan operasional industri, serta h) minimnya ruang terbuka hijau (RTH).

Selain dari tantangan yang dihadapi, peluang yang dapat dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk meralisasikan program dan kegiatan pada Renstra adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan ICT dengan berbagai perangkatnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, jangkauan, dan akses pendidikan bagi masyarakat;
2. Pelimpahan kewenangan pendidikan kepada daerah (kabupaten/kota) memberi kesempatan yang luas bagi pengembangan dan penguatan pendidikan di Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan *shareholder* daerah;
3. Penerapan konsep *tripartite* di bidang pendidikan dimana masyarakat dan industri sebagai *partner* Dinas Pendidikan dalam mewujudkan keselarasan penyelenggaraan pendidikan dan penguatan kompetensi peserta didik yang diharapkan.
4. Dukungan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang menjadikan Pendidikan sebagai sektor yang berperan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi serta pembangunan budaya di Jawa Barat.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Lembaga pendidikan sebagai instansi yang memiliki tanggungjawab dalam memberikan layanan publik (*public services*) yang berkualitas di bidang pendidikan akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal akibat dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi. Maka dari itu, perlu rumusan rencana strategis dengan mendasarkan pada sejumlah isu-isu strategis yang ada sehingga Visi, Misi Pemerintah Daerah dan Tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dicapai dengan baik. Analisis terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi perlu dilakukan agar diperoleh gambaran akan permasalahan yang dihadapi untuk dicari alternatif solusi pemecahannya.

3.1.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Keterlaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung dan penghambat baik yang berasal dari faktor internal lembaga maupun eksternal lembaga. Sejumlah program dapat direalisasikan dengan baik, tetapi ada juga sejumlah program yang belum direalisasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik yang muncul, diantaranya karena faktor SDM internal Dinas Pendidikan sendiri maupun SDM pelaksana kebijakan dan program, yakni tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat sekolah. Selain itu, faktor yang juga harus menjadi pertimbangan adalah berkenaan dengan sarana prasarana pendidikan yang ada.

Sarana Prasarana menjadi faktor penting yang berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Semakin berkualitas sarana prasarana yang ada, maka prestasi peserta didik yang ditunjukkan juga akan semakin baik. Faktor selanjutnya yang juga menjadi perhatian adalah ketersediaan sistem informasi pendidikan. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum memiliki sistem informasi yang memadai, dari sistem informasi sarana prasarana, tenaga pendidik & kependidikan, peserta



didik, pembiayaan pendidikan, kurikulum, kelembagaan/manajemen sekolah, komite sekolah, maupun sistem informasi lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Pendidikan. Maka dari itu, ketiga faktor tersebut menjadi prioritas Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk masa lima tahun mendatang dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Analisis lingkungan internal dan eksternal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang didalamnya mencakup: (1) sumber daya aparatur, tenaga pendidik dan kependidikan; (2) sarana prasarana layanan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan; (3) kualitas layanan dan mutu pendidikan; (4) relevansi pendidikan non-formal (PKBM/Kursus, dll) dengan dunia industri; dan (5) tata kelola dan organisasi kelembagaan.

Hasil analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, treath) berdasarkan sejumlah bidang permasalahan tersebut secara detail adalah sebagai berikut:

1. Strength (Kekuatan)

- a. Ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) yang memadai secara kuantitas dalam melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- b. Kapasitas organisasi (*organizational capacity*) Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah dan Tujuan yang ditetapkan dengan adanya seperangkat regulasi dan prosedur yang memadai sehingga tidak terjadi tumpah-tindih dalam pelaksanaan teknis layanan pendidikan.
- c. Dukungan perangkat ICT (*Informational Communication and Technology*) dalam menunjang pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien.
- d. Pendanaan (APBD Kota Bekasi) yang memadai memberikan peluang akan implementasi program-program strategis dalam peningkatan akses dan pemerataan mutu Pendidikan yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenjang Pendidikan yang ada.

2. Weakness (Kelemahan)

- a. Kurangnya sumber daya manusia pada kelompok jabatan fungsional (pengawas), penilik dan tenaga pamong pembinaan profesional guru manajemen sekolah kurang maksimal;



- b. Pemanfaatan ICT sebagai *management tool, decision & executive support system* belum sepenuhnya digunakan sehingga sejumlah layanan masih menggunakan cara konvensional dan berdampak pada efektivitas kebijakan dan layanan;
- c. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan, dengan berpartisipasi aktif dalam penguatan sekolah khususnya dalam penguatan budaya daerah, kesenian, keagamaan, serta nilai kearifan lokal pada masing-masing daerah;
- d. Peran komite sekolah belum sampai pada partisipasi aktif dengan terlibat secara langsung pada program-program strategis yang disusun oleh sekolah, bukan hanya penyampai aspirasi tetapi juga sebagai *partner* sekolah;
- e. Penguatan peran Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) masih perlu ditingkatkan sebagai wadah penguat profesi dan juga pelestari budaya dan nilai kearifan lokal;
- f. Rasio pengawas/penilik dengan guru sangatlah jauh, sehingga efektivitas pembinaan (supervisi) dan pengawasan yang selama ini dilakukan belum berjalan optimal dan tidak menyentuh pada kegiatan instruksional;
- g. Pendidikan non formal (PKBM/LPK/Kursus,dll) belum menjadi pilihan masyarakat dalam pengembangan *hard & soft skill* sehingga lembaga perlu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha /industri dalam penetapan standar kompetensi dan membuka peluang keterserapan lulusan;
- h. Sarana prasarana pendidikan di beberapa sekolah belum memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) baik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar karena minimnya dukungan secara pendanaan dari pemerintah maupun masyarakat.
- i. Sinergitas kebijakan dan program Dinas Pendidikan dengan instansi/dinas terkait belum terlaksana dengan baik;
- j. Implementasi SNP (Standar Nasional Pendidikan) pada Pendidikan Anak Usia Dini belum optimal khususnya pada standar tenaga pendidik, dimana hampir sebagian besar tenaga pendidik (guru) berpendidikan SMA/Sederajat.

3. Opportunity (Peluang)

- a. Letak geografis yang strategis dimana Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta;



- b. Aksesibilitas transportasi yang baik sehingga peserta didik mudah dalam menjangkau lembaga pendidikan yang diinginkan;
- c. Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi khususnya dalam kebijakan peningkatan dan pengembangan pendidikan di Kota Bekasi;
- d. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi cukup besar dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan;
- e. Dukungan dari pelaku industri dalam penguatan *soft skill* tenaga pendidik maupun partisipasi program-program pendidikan melalui pemberian dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- f. Perkembangan ICT dengan berbagai perangkatnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, jangkauan, dan akses pendidikan bagi masyarakat;
- g. Pelimpahan kewenangan pendidikan kepada daerah (kabupaten/kota) memberi kesempatan yang luas bagi pengembangan dan penguatan pendidikan di Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan *shareholder* daerah;
- h. Penerapan konsep *tripartite* di bidang pendidikan dimana masyarakat dan industri sebagai *partner* Dinas Pendidikan dalam mewujudkan keselarasan penyelenggaraan pendidikan dan penguatan kompetensi peserta didik yang diharapkan.
- i. Dukungan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang menjadikan Pendidikan sebagai sektor yang berperan penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi serta pembangunan budaya di Jawa Barat.

4. Threats (Ancaman)

- a. Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, dan penyalahgunaan internet lainnya sehingga perlu adanya edukasi internet positif kepada peserta didik ;
- b. Relevansi pendidikan khususnya pada pendidikan non-formal (PKBM/LPK/Kursus) untuk meningkatkan keterserapan lulusan di dunia industry ;
- c. Rendahnya integrasi program-program pendidikan dimana program yang ada masih disusun secara terpisah (parsial) sehingga perlu adanya sinkronisasi antara instansi/dinas terkait ;
- d. Paradigma masyarakat yang menganggap tanggungjawab pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran



- masyarakat bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga) ;
- e. Belum meratanya kualitas lembaga pendidikan dan kecenderungan persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri berdampak pada kesenjangan dalam penerimaan peserta didik baru dimana sekolah swasta adalah alternatif setelah sekolah negeri ;
 - f. Meningkatnya demoralisasi masyarakat yang berdampak pada pola pergaulan peserta didik dan kecenderungan berperilaku negative; merokok, pergaulan bebas, narkoba, minumam keras, dan lain-lain sehingga berpengaruh terhadap kemajuan dan kualitas lulusan pendidikan.
 - g. Adanya tuntutan akan relevansi pendidikan non-formal (PKBM, LPK, Kursus) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
 - h. Belum terakreditasi seluruhnya lembaga pendidikan di tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, maupun PKBM/LPK/Kursus
 - i. Kebutuhan tenaga pendidik (guru) profesional, kesesuaian kualifikasi, serta linearitas pendidikan yang dimiliki;
 - j. Dominasi sekolah swasta menjadi kendala utama dalam pemerataan mutu pendidikan;

3.1.2. Pemetaan Permasalahan dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan muncul akibat adanya kesenjangan (gap) antara kenyataan yang terjadi (hasil capaian) dengan apa yang diharapkan. Kondisi ini menjadi indikasi adanya ketidaksielarasan kegiatan maupun pelaksanaan program yang ditetapkan. Identifikasi terhadap masalah pokok beserta akar permasalahan dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

T-B 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Ketersediaan kelompok jabatan fungsional yang memadai	Masih perlu optimalisasi kinerja pejabat fungsional dalam melakukan	Kurangnya sumber daya pada jabatan fungsional di lingkungan Dinas



No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		pembinaan dan pendampingan manajerial dan profesionalisme guru	Pendidikan
2	Belum dimanfaatkannya ICT secara optimal guna mendukung kinerja Dinas Pendidikan	Efektivitas dan efisiensi pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan masih belum optimal	Belum adanya SDM yang secara khusus bertanggungjawab dalam mengembangkan dan mengelola ICT di lingkungan Dinas Pendidikan
3	Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan budaya daerah, kesenian, keagamaan, dan penguatan nilai kearifan lokal	Belum adanya sinergitas dan persamaan persepsi antara sekolah dan masyarakat akan tanggungjawab bersama dalam penguatan budaya daerah, kesenian, keagamaan, dan nilai kearifan lokal	Tidak adanya program strategis yang disusun oleh Dinas Pendidikan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam penguatan budaya daerah, kesenian, keagamaan, dan nilai kearifan lokal
4	Minimnya peran komite sekolah secara aktif dalam penyusunan program-program sekolah	Belum dilaksanakannya program penguatan komite sekolah secara komprehensif di semua jenjang pendidikan	Paradigma masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan sepenuhnya tanggungjawab sekolah dan pemerintah
5	Perlu peningkatan peran MGMP dan KKG sebagai wadah penguat profesi dan pelestari budaya dan nilai kearifan lokal	Peran MGMP dan KKG yang masih terbatas pada kegiatan yang bersifat rutin dan administrative, belum kepada kegiatan yang sifatnya strategis	Tidak adanya program kerja yang disusun secara sistematis dan terpadu oleh MGMP dan KKG sesuai kebutuhan masing-masing wilayah kerja
6	Keterbatasan program pembinaan (<i>supervisi</i>) yang dilakukan oleh pengawas/penilik baik akademik maupun manajerial	Pengembangan profesi guru dan manajemen sekolah tidak berjalan dengan efektif akibat kurangnya intensitas pembinaan yang dilakukan pengawas	Minimnya jumlah pengawas sekolah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan
7	Pendidikan non formal belum menjadi pilihan utama dalam pengembangan	Belum adanya standar baku dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal ;	Belum adanya program strategis Dinas Pendidikan untuk



No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	<i>hard & soft skill</i>	standar pendidik & pendidikan, pengelolaan, kurikulum, serta <i>link and match</i> dengan dunia usaha dan industri	memperkuat peran lembaga non-formal melalui <i>link and match</i> dengan dunia usaha dan industri
8	Adanya sekolah yang belum memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ditetapkan pemerintah.	Kualitas penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena ketidakterpenuhan standar sarana prasarana yang dimiliki sekolah.	Terbatasnya dana yang dimiliki Dinas Pendidikan untuk alokasi perbaikan dan pembangunan sarana prasarana sekolah
9	Implementasi SNP (Standar Nasional Pendidikan) pada Pendidikan Usia Dini belum optimal khususnya pada standar tenaga pendidik, dimana hampir sebagian besar tenaga pendidik (guru) berpendidikan SMA/Sederajat.	Banyaknya lembaga pendidikan yang belum memenuhi SNP, khususnya pada aspek sarana prasarana pendidikan dan kualifikasi tenaga pendidik.	Belum tersosialisasikan sepenuhnya SNP kepada badan penyelenggara pendidikan dan pelaksana pendidikan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerah sendiri sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kualitas layanan termasuk di dalamnya adalah layanan pendidikan yang merata, adil, terjangkau dan berkualitas.

Maka atas dasar tersebut Visi, Misi dan Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023 yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi menjadi landasan bagi segenap OPD termasuk Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam merumuskan kebijakan dan program di bidang pendidikan. Visi pembangunan Kota Bekasi adalah menjadi:

“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”



Hal-hal menyangkut pengertian, ruang lingkup atau batasan dari setiap pernyataan dalam Visi tersebut agar menuju pada satu penafsiran/ atau persepsi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. **Cerdas**, Bekasi yang cerdas bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan technology informasi dan komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (smart city), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan ;
2. **Kreatif**, Bekasi yang kreatif bahwa warga kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam beraktifitas berkehidupan dan berusaha ;
3. **Maju**, Bekasi yang maju mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta berkesinambungan ;
4. **Sejahtera**, Bekasi yang sejahtera mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat kota Bekasi yang cerdas, kreatif dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai ;
5. **Ihsan**, Bekasi yang ihsan mengandung arti bahwa dalam masyarakat atau pemerintahan yang baik (good governance) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan atau perundangan yang berlaku, makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial, dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.



Melalui penetapan Visi tersebut, harapan selama lima tahun Kota Bekasi bisa menjadi daerah yang memiliki sumber daya manusia cerdas, memiliki kreativitas yang mumpuni, mengedepankan intelektualitas dan akhlaq, hidup sejahtera, dan memegang prinsip kebaikan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan jangka menengah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik ;
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai ;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing ;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif ;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Berdasarkan pada Visi dan Misi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 maka disusun sejumlah program prioritas yang berkenaan dengan bidang pendidikan selama lima tahun kedepan yakni:

1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin

Merupakan program Kota Bekasi untuk mengurangi siswa putus sekolah yang disebabkan oleh faktor finansial/pendanaan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kota Bekasi. Penjabaran program tersebut pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah dalam bentuk :

- a. Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan
 - b. Peningkatan jumlah besaran BOP Kota Bekasi
2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi

Lembaga kursus dan pelatihan sekarang ini belum menjadi pilihan utama dalam pengembangan *hard & soft skill* masyarakat. Salah satu faktor yang mendasari hal tersebut adalah berkenaan dengan relevansi dan jaminan/garansi bagi para lulusan



untuk diakui kemampuannya di dunia industri. Sejumlah program Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bentuk penjabaran program ini adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikasi tutor LPK/PKBM;
- b. Akreditasi LPK/PKBM;
- c. Pelatihan tutor LPK/PKBM;
- d. Peningkatan kerjasama LPK dengan Dunia Usaha dan Industri di wilayah Kota Bekasi, dan
- e. Pemberian bantuan pendanaan penyelenggaraan & fasilitas LPK/PKBM.

3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (*smart school*)

Kemajuan ICT perlu direspon secara positif oleh lembaga pendidikan supaya budaya *e-literacy* bisa menjadi bagian kehidupan dan sosial peserta didik. Ada 4 (empat) program yang disusun Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mewujudkan hal tersebut, yakni :

- a. Pembuatan portal e-raport siswa ;
- b. Absensi elektronik bagi siswa ;
- c. Elektronik konseling & parenting bagi orang tua, dan
- d. Pembuatan portal pengaduan orang tua.

4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan Tahfidz Al-Qur'an

Setiap potensi yang dimiliki peserta didik perlu diapresiasi oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan sekaligus sebagai penguat (*re-inforcement*) pada diri peserta didik untuk terus berprestasi. Maka dari itu, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam 5 (lima) tahun mendatang memberikan penghargaan dalam bentuk beasiswa yang diperuntukkan bagi:

- a. Siswa berprestasi
- b. Siswa dengan kemampuan, minat, dan bakat, serta
- c. Siswa dengan penguasaan tahfidz (hafalan Al-Quran)



3.3. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat

▪ Visi

Visi Provinsi Jawa Barat :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Hal-hal menyangkut pengertian, ruang lingkup atau batasan dari setiap pernyataan dalam visi tersebut agar menuju pada satu penafsiran/ atau persepsi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. ***Jabar Juara Lahir Bathin*** adalah pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun bathin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.
2. ***Inovasi*** adalah pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah di dukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan public, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan.
3. ***Kolaborasi*** adalah perwujudan Visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

▪ Misi Pembangunan Pendidikan

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, yaitu :

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.

Konsep Jabar Juara secara “bathin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berahlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram dan bahagia



2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif

Melalui peningkatan pelayanan public yang inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan public yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat ; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan ; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari tejaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan social diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban Visi Jabar Juara Lahir Bathin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistic yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil

Melalui Pemanfaatan Teknology Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta pelaku pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkab perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat



mengatasi ketimpangan antar kawasan pedesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang

Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam tata kelola pemerintahan, *“Good Governance”* atau “Tata Kelola Yang Baik” harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu consensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Di Jawa Barat Good Governance direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (smart province) untuk menjami kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien dan handal

Perwujudan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 meliputi:

Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

- **Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat**
Untuk mewujudkan misi ke – 2 dapat ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Barat: *Meningkatkan aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dengan sasaran menyelenggarakan pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau.*
Adapun arah kebijakan pendidikan Provinsi Jawa barat adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah
 2. Meningkatkan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah
 3. Meningkatkan Minat Baca masyarakat.

- **Prioritas Pembangunan Daerah 2018 – 2023**
Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2018-2023. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023, meliputi:



1. Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Insfrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan bangun desa (gerbang desa)
8. Subsidi gratis golekmah
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

▪ **Akses Pendidikan Untuk Semua**

Education For All (EFA) merupakan pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, pendidikan adalah hak warga Negara tanpa kevuai baik berupa pendidikan formal maupun non formal. Hal ini sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-Uandang Dasar (UUD) 1945 bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Akses pendidikan untuk semua sebagai upaya memperluas kesempatan pendidikan pada semua tingkatan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal bagi seluruh masyarakat Jawa Barat terutama masyarakat kurang mampu. Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Langkah Pemerintah Jawa Barat guna mewujudkan akses pendidikan untuk semua diterjemahkan dalam Jabar juara sebagai berikut :

a. Sekolah Juara (Sekolah Jabar Juara – Sajajar)

Sekolah Jabar Juara (Sajajar) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan menengah dan layanan khusus. Selain itu juga, Sekolah Jabar Juara (Sajajar) merupakan inovasi layanan pendidikan menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan. Tujuan Sajajar antara lain perluasan sekolah induk untuk memperkuat sekolah terbuka, penguatan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industry, pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industry, pemanfaatan teknologi yang



mendukung terhadap system pembelajaran yang aktif dan efisien (termasuk untuk belajar jarak jauh) dan terakhir pengembangan system asesmen yang memungkinkan rekognisi terhadap pengalaman belajar berbeda pada peserta didik. Implementasi Sekolah Jabar Juara (Sejajar), diantaranya : Sekolah Menengah Terbuka, SMK Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Smart School, Digital Learning, Bea siswa untuk siswa miskin, Penguatan Laboratorium SMA, Bengkel kerja SMK, Pengembangan SMK Tematik. Selain itu juga focus pada penguatan kerjasama SMK dengan industry, Penguatan kompetensi guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan tenaga pendidikan lainnya, Pengembangan Sekolah Hijau dan Pengembangan Sekolah Inklusif, Ramah Anak, Sekolah Aman Bencana dan Sekolah Tangguh.

b. Jabar Masagi

Jabar Masagi merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menumbuhkan manusia yang harmoni dengan diri, alam dan seluruh makhluk hidup. Program tersebut akan menumbuhkan identitas budaya lokal pada siswa-siswi di Jawa Barat, dengan nilai-nilai kearifan Sunda Priangan, Cirebonan dan Betawian. Jabar Masago berfokus pada pendidikan karakter dengan mengungkap filosofi surti, harti, bukti dan bakti, serta mengajarkan peserta didik untuk cinta agama, bela Negara, menjaga budaya serta cinta lingkungan.

c. Sekolah Tanpa Gawai (Setangkai)

Sekolah tanpa gawai (Setangkai) merupakan satu inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melindungi anak dan remaja dari pengaruh informasi yang tidak layak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat pedoman agar anak-anak mampu mengendalikan pemakaian gawai di sekolah. Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan gawai adalah literasi digital yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kecakapan kognitif maupun teknis. Untuk kedepan perlu dipastikan TIK dapat terintegrasi penuh kedalam pendidikan dan pelatihan diseluruh jenjang.

d. Sekolah Terpadu

Sekolah Terpadu yakni program Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memudahkan akses masyarakat seluas-luasnya pada fasilitas pendidikan terutama



pada daerah yang memiliki keterbatasan dari sisi geografis. Sekolah terpadu yaitu dua atau tiga sekolah dengan jenjang pendidikan berbeda (pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dalam satu lokasi yang diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk bersekolah di daerah-daerah yang rawan terhadap putus sekolah dan akses yang jauh untuk melanjutkan sekolahnya.

e. Guru Juara

Program guru juara merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Mewujudkan guru yang berkualitas dengan kompetensi yang tersertifikasi serta berdaya saing akan mampu menghasilkan siswa yang unggul. Program ini akan diawali dengan pemerataan rasio guru dan murid, pemberian subsidi terutama sembako untuk guru yang membutuhkan, dan pemberian tunjangan bagi guru sesuai dengan prestasi dan kinerjanya.

f. SMK Juara

SMK Juara difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi SMK di Jawa Barat, sertifikasi nasional bagi SMK mulai dari pendidik hingga lulusan melalui kerjasama dengan lembaga akademik baik di dalam maupun luar negeri, dan menciptakan SMK yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan local sehingga tidak ada lagi miss match antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

g. Perguruan Tinggi Juara

Perguruan Tinggi Juara dengan menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Center of Exelence dan Inovation melalui kerjasama akademisi, bisnis/industry, Pemerintah, Masyarakat serta media. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun turut untuk mewujudkan adanya Perguruan Tinggi di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Desa binaan sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi di Jawa Barat.

h. Budaya Juara

Penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa semangat baru dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki kebudayaan yang unik, menarik dan beraneka ragam. Namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, aktualisasi kebudayaan lokal pada kenyataannya masih mengalami hambatan, diantaranya masih rendahnya perlindungan terhadap



budaya lokal, masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal, kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri serta kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal.

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, Jawa Barat telah menetapkan program Budaya Juara dengan menekankan pada upaya pemajuan kebudayaan Jawa Barat yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya.

i. Perempuan Juara

Sekolah perempuan capai impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) merupakan sekolah untuk perempuan khususnya di pedesaan. Sekolah ini merupakan wadah perempuan desa bertukar pengetahuan dan pengalaman, menemukenali kebutuhan dan juga kepentingan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pengetahuan dan pengalaman yang dipertukarkan dalam sekolah ini berkaitan dengan kebutuhan perempuan yang bersifat praktis maupun strategis. Untuk memulai kegiatan diperlukan sebuah proses pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator yang akan mendampingi seluruh proses kegiatan sekolah perempuan nantinya.

j. Olahraga Juara

Olahraga Juara meliputi pembangunan atau revitalisasi pusat olahraga untuk menjadikan pusat olahraga yang dapat meningkatkan prestasi olahraga di Jawa Barat, mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2020 dan mendirikan layanan gratis perbaikan rumah atlet yang berprestasi.

k. Milenial Juara

Milenial Juara sebagai upaya mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif untuk menjawab berbagai tantangan serta persaingan global. Program Milenial juara meliputi *Career Expo* dan *Career Days* untuk Fresh Graduate di setiap Kabupaten/Kota, *Star Up/Creative Hub* di Kabupaten/Kota dengan fasilitas pengembangan ide dan bisnis, ekspedisi barudak juara, dan beasiswa kuliah dalam dan luar negeri untuk putra dan putri daerah.

l. Migran Juara

Program Migran Juara adalah program perluasan kesempatan kerja keluar negeri bagi pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat. Program ini memuat antara



lain akselerasi peningkatan kesempatan kerja di luar negeri melalui peningkatan kompetensi PMI, Sertifikasi Profesi PMI dan peningkatan layanan PMI melalui *Migrant Centre* yang menyediakan layanan pusat pelatihan bagi calon PMI, PMI dan Purna PMI ; Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Keimigrasian bagi Calon PMI, dan layanan *call centre* bagi calon PMI dan PMI.

m. Tanggap Bencana Juara

Tanggap Bencana Juara merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Hal ini menjadi penting mengingat Provinsi Jawa Barat berada pada daerah rawan bencana (*ring of fire*). Program Tanggap Bencana Juara meliputi penerapan kurikulum muatan lokal tanggap bencana di seluruh sekolah di Jawa Barat, pemetaan potensi dan pusat mitigasi bencana, *disaster –proofing* terkait ketangguhan infrastruktur vital provinsi dan fasilitas vital wilayah perkotaan dan pedesaan dan *crisis center* kebencanaan.

Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga didasarkan pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan sinergitas pembangunan di bidang pendidikan serta mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional.

▪ **Visi**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki visi sebagai berikut: ***“Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”***

Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Berikut deskripsi lengkap makna insan cerdas dan kompetitif.

- **Cerdas Spiritual** : Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
- **Cerdas emosional dan sosial** : 1) Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni,



nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. 2) Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

- **Cerdas Intelektual** : 1) Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.
- **Cerdas kinestetis** : Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas.
- **Makna Insan Indonesia Kompetitif** : Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, Bersemangat juang tinggi, Jujur, Mandiri, Pantang menyerah, Pembangunan dan pembinaan jejaring, Bersahabat dengan perubahan, Inovatif dan menjadi agen perubahan, Produktif, Sadar mutu, Berorientasi global, Pembelajaran sepanjang hayat, Menjadi rahmat bagi semesta alam.

▪ **Misi**

Sejumlah misi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas
6. Birokrasi dan Pelibatan Publik

▪ **Tujuan Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan



2. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan
3. Peningkatan akses paud, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus
4. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter
5. Peningkatan jati diri bangsa melalui pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan
6. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Telaah RT/RW dan KLHS

Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara tentunya secara pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya memiliki keterkaitan erat dengan dinamiasi masyarakat yang ada. Pendidikan sebagai *social elevator* dapat meningkatkan citra positif masyarakat suatu daerah melalui penguasaan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Pendidikan tidak lepas dari aspek lingkungan hidup pada suatu wilayah karena sejatinya pendidikan adalah bagian dari lingkungan hidup yang muncul dan berkembang akibat adanya kebutuhan masyarakat. Saat ini pendidikan menjadi salah satu bidang yang dikelola secara otomom oleh pemerintah daerah dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan masing-masing daerah. Meskipun demikian, akses terhadap pendidikan oleh masyarakat tidak dibatasi secara teritori sehingga masyarakat luar Kota Bekasi memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pengembangan pendidikan perlu memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan hidup yang ada agar tidak terjadi alih fungsi wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 diharapkan agar pembangunan yang dilakukan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya mengarahkan pembangunan di Kota Bekasi yang dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan fleksibel, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan penyelenggaraan tata ruang di wilayah Kota Bekasi adalah untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Dalam mewujudkan arah penataan wilayah yang diharapkan, maka kebijakan pengembangan tata ruang dan wilayah di Kota Bekasi meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Dalam mendukung efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Bekasi, pemerintah menetapkan kebijakan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sejumlah strategi untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah dengan: (a) menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing pusat pelayanan: sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya; (b) mengendalikan perkembangan wilayah Bekasi Bagian Utara dan Bagian Tengah; (c) mengembangkan wilayah Bekasi Bagian Selatan; (d) mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan kota-kota lainnya di Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan yang cepat tumbuh; (e) mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung



minimumnya; (f) menetapkan PPK (Pusat Pelayanan Kota), SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kota) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan).

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kota Bekasi dilakukan sebaik mungkin dengan tidak merusak lingkungan alam serta situs budaya yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang lebih baik. Maka dalam kebijakannya, rencana pengembangan sarana pendidikan diprioritaskan pada:

- a. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ SMK;
- b. Penataan dan/ atau pengembangan kawasan pendidikan tinggi (perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi dan yang sederajat) eksisting maupun baru di PPK dan koridor jalan Jatiwaringin; dan
- c. Penggabungan sarana pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana pendidikan pada satu kompleks sarana pendidikan secara bertahap.

Penataan dan pengembangan kawasan pendidikan selain dari aspek ruang dan wilayah harus juga mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur, demografi, dan ketersediaan pusat layanan administrasi publik. Melalui penataan ruang dan wilayah yang baik serta mengedepankan kelestarian budaya, alam dan lingkungan sekitar dengan mengepankan azas azas manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan fleksibel, dan berkelanjutan dapat mewujudkan Kota Bekasi yang kreatif, aman, nyaman dan sejahtera.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 diartikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program (KRP).

Pada dasarnya KLHS adalah upaya pemerintah daerah dalam menganalisa rencana pembangunan yang disusun sudah sesuai dengan pengembangan berkelanjutan atau belum (*sustainability development*). Dengan adanya KLHS ini diharapkan pemerintah daerah dalam pembangunan wilayahnya memperhatikan permasalahan lingkungan hidup yang akan terjadi dan bagaimana upaya dalam membangun lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Penelaahan terhadap KLHS yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi secara khusus dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai dampak/efek lingkungan, sekaligus mendorong segenap elemen daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tiga prinsip utama yang menjadi azas dalam penyusunan KLHS yakni: keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*). Prinsip keterkaitan (*interdependency*) mengandung pengertian bahwa pembangunan harus memiliki keterkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, antar unsur dengan unsur lainnya, anatar instansi dengan instansi lainnya, antar sektor dengan sektor lainnya, maupun antar wilayah dengan wilayah dengan wilayah lainnya. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*) menekankan pada keseimbangan antara aspek, pemangku kepentingan, ekosistem, makhluk hidup dengan ruang hidupnya, pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan sumber daya alam, serta kesimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampak yang akan ditimbulkan. Sedangkan prinsip keadilan (*justice*) menekankan pada produk kebijakan, rencana dan program yang ditetapkan tidak membatasi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, infrastruktur, atau informasi kepada seluruh masyarakat daerah.

Pemerintah Kota Bekasi dengan luas wilayah $\pm 21,049$ Ha yang terdiri 12 kecamatan dan 56 kelurahan dalam hal permasalahan lingkungan hidup setidaknya ada 8 (delapan) isu lingkungan yang perlu penanganan secara optimal. Isu lingkungan tersebut diantaranya: (1) **banjir** yang terjadi hampir lebih dari sebagian kecamatan; (2) **kemacetan** pada jalan-jalan protokol akibat banyaknya kendaraan yang ada tidak diimbangi dengan ruas jalan yang dimiliki; (3) **kekurangan air bersih/minum** pada beberapa wilayah mengingat belum seluruh wilayah mendapat layanan perpipaan (PDAM); (4) **sampah** yang diakibatkan oleh adanya TPA Bantargebang dan Sumurbatu; (5) **kawasan kumuh**; (6) alih fungsi lahan yang disebabkan pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan; (7) polusi udara akibat volume kendaraan dan operasional industri, serta (8) minimnya ruang terbuka hijau (RTH).

Dukungan lingkungan hidup yang memadai akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat dan juga makhluk hidup lainnya. Pola kehidupan masyarakat suatu daerah diharapkan tidak melebihi ambang batas yang dapat merusak lingkungan hidup yang ada. Maka dari itu, perkiraan dampak resiko yang akan terjadi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup perlu diantisipasi sejak awal dan dilakukan tindakan preventif salah satunya melalui upaya penyadaran kepada masyarakat dan edukasi kepada peserta didik melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana efektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui penanaman



nilai kecintaan terhadap lingkungan; dengan tidak merusak keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar, berupaya meminimalisir dampak yang sudah terjadi, serta melakukan konservasi terhadap kerusakan lingkungan hidup.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Sejumlah isu strategis yang menjadi dasar rumusan kebijakan dan program Dinas Pendidikan Kota Bekasi didasarkan pada analisis kondisi eskting melalui kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan bidang-bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sejumlah isu-isu strategis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Kewenangan Pendidikan Menengah

Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah dimana salah satu bidang yang menjadi tanggungjawab dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut menandakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah bukan lagi menjadi domain pemerintah kabupaten/kota. Hal ini tentunya menjadi potensi dan peluang bagi kabupaten/kota untuk lebih concern dalam mengembangkan pendidikan pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal/In Formal sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dimiliki.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Akreditasi Sekolah/Lembaga Pendidikan

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas harus ditunjang oleh pengelolaan lembaga yang profesional, tenaga pendidikan yang kompeten, kurikulum terpadu, integritas kepemimpinan serta keterpenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan. Pengakuan akan kredibilitas lembaga pendidikan harus dibuktikan dengan adanya Akreditasi dari lembaga berwenang yang menjamin bahwa lembaga pendidikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dari sekian banyak penyelenggara PAUD di Kota Bekasi, baru Taman Kanak-Kanak (TK) saja yang telah mengikuti akreditasi, dan itupun 31 TK dari 776 TK yang ada, artinya baru 2,24 % dari total jumlah lembaga PAUD yang ada.

Akreditasi lembaga merupakan keniscayaan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan baik lembaga pendidikan formal dan non-formal sebagai



bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pengguna (*user*) dalam kaitannya dengan mutu pendidikan. Akuntabilitas dan kredibilitas lembaga pendidikan dibuktikan dengan pengakuan secara tertulis oleh asesor yang menjamin bahwa lembaga pendidikan sudah memenuhi aspek layanan dan kebermutuan dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari sejumlah LKP yang ada di Kota Bekasi, baru ada 14% (14 LKP) yang sudah terakreditasi, sedangkan selebihnya dengan 274 LKP belum terakreditasi. Dengan tingginya animo masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendidikan Masyarakat (PENMAS) di Kota Bekasi tentunya hal ini menjadi perhatian khusus oleh Dinas Pendidikan bahwa bidang pendidikan non-formal yang harus juga didorong agar memenuhi standar pelayanan pendidikan melalui akreditasi lembaga.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), ada 10 SMP Negeri yang belum terakreditasi. Sedangkan SMP Swasta dari 222 sekolah yang sudah terakreditasi sebanyak 169 sekolah, sedangkan yang belum terakreditasi sebanyak 53 sekolah. Jumlah total Sekolah Menengah Pertama di Kota Bekasi dari 271 Sekolah Negeri dan Swasta, sebanyak 208 sekolah sudah terakreditasi dan 63 sekolah belum terakreditasi.

3. Pemerataan dan Daya Tampung Pendidikan

Salah satu problematik yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah berkenaan dengan pemerataan pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan yang ada. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan jumlah sebanyak 1,384 lembaga PAUD (TK/KB/TPA/SPS) yang tersebar di 12 kecamatan APK (Angka Partisipasi Kasar) di Kota Bekasi relative masih rendah, yakni baru mencapai 51,47 %. Artinya dari 199,092 anak penduduk usia 0-6 tahun, baru 102,480 anak yang masuk Pendidikan Anak Usia Dini, dan masih ada 96.612 anak usia 0-6 tahun yang belum tertampung di lembaga PAUD sederajat. Jika dilihat dari jumlah 111.492 anak usia 4-6 tahun, yang belum tertampung di lembaga TK/RA sederajat di Kota Bekasi adalah sebanyak 66,067 (59,26 %) anak usia 4-6 tahun.

Sementara APK SMP di Kota Bekasi tahun pelajaran 2017/2018 sebesar 98,33 %. Angka tersebut termasuk jumlah siswa yang berdomisili diluar kota Bekasi tetapi bersekolah di Kota Bekasi, terutama sekolah-sekolah yang berada di perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kab/Kota yang lain. APM SMP di Kota Bekasi tahun



pelajaran 2017/2018 sebesar 82,35 %. Artinya angka partisipasi siswa usia 13-15 tahun masih dibawah jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Dari tabel dibawah dapat terlihat apabila dibandingkan antara jumlah siswa SMP sederajat dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun masih ada 508 penduduk usia 13-15 tahun yang belum terlayani pendidikan SMP nya. Apabila dibandingkan antara jumlah siswa usia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun ada 21.726 orang penduduk usia 13-15 tahun yang belum terlayani pendidikan menengah pertamanya, artinya perlu ada upaya untuk mendorong partisipasi penduduk usia 13-15 tahun kembali ke bangku sekolah.

Tingginya anak usia 0-6 tahun di Kota Bekasi berdampak pada daya tampung lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang ada. Pada sejumlah kecamatan, terjadi kesenjangan antara lembaga penyelenggara dengan anak usia sekolah, sehingga tidak semua anak usia 0-6 dapat memperoleh layanan pendidikan memadai. Rasio lembaga PAUD terhadap jumlah siswa rata-rata di Kota Bekasi adalah 1:60,39. Artinya satu lembaga PAUD jumlah siswanya rata – rata sebanyak 60 siswa. Bahkan di Kecamatan Bantargebang, rasio lembaga dengan jumlah siswa adalah 1:102 siswa. Minimnya daya tampung lembaga berdampak pada APK yang rendah. Di Kecamatan Bantargebang sendiri ada sekitar 4.587 anak belum terlayani pendidikan.

4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Pendidik

Kualitas pembelajaran ditentukan bukan hanya dari pengalaman pendidik, tetapi juga tingkat dan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik (guru) memegang peranan penting dalam mensukseskan tujuan pendidikan dalam mengembangkan segenap potensi yang dimiliki peserta didik. Maka dari itu, guru harus memiliki kualifikasi yang memadai agar *output* dari pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualifikasi tenaga pendidik pada jenjang PAUD di Kota Bekasi dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih banyak guru PAUD yang belum sarjana (S1). Dari jumlah total jumlah total 5.871 orang guru PAUD yang ada, ada sekitar 1381 orang guru TK berijazah D1, 115 guru TK berijazah D2, 147 orang guru TK berijazah D3, 2 orang S1 Non PAUD DAN 2.438 orang guru PAUD berijazah D4/S1 PAUD. Untuk guru Kelompok Bermain



seluruhnya berijazah D1 – S1 sejumlah 861 orang. Guru TPA 41 orang berijazah D1-S1, guru SPS sebanyak 886 orang berijazah D1-S1.

Masih banyaknya siswa yang mengulang baik pada SD Negeri maupun SD Swasta menjadi indikasi bahwa kualitas pembelajaran di sekolah masih harus ditingkatkan baik melalui penguatan kompetensi guru, penambahan sarana dan media pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat dan komite, maupun penciptaan lingkungan akademik yang memadai. Ketidakmampuan peserta didik mencapai prestasi belajar dengan tidak mengulang kelas tidaknya dipengaruhi oleh satu faktor semata, ada banyak faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal. Akan tetapi setidaknya faktor eksternal dapat menjadi stimulus bagi peserta didik untuk mampu menunjukkan prestasi yang diharapkan. Maka dari itu, figur seorang guru sebagai tenaga pendidikan memegang peranan penting dalam mendorong, mendampingi, dan menguatkan peserta didik bahwa ia mampu untuk berprestasi. Siswa mengulang di Kota Bekasi baik pada SD Negeri maupun SD Swasta sebanyak 886 anak. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, jumlah siswa putus sekolah pada SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 74 siswa. Sedangkan angka mengulang pada SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi berjumlah 55 siswa dan jumlah total siswa putus sekolah dan mengulang sebanyak 129 siswa.

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa kualifikasi tenaga pendidikan yang dipersyaratkan adalah Strata 1 (S1). Dalam praktiknya, masih ada sejumlah guru di Kota Bekasi yang belum memenuhi kualifikasi minimal tenaga pendidik. Sebanyak 405 guru berpendidikan D-II, 188 guru dengan kualifikasi D-III, dan D4 sebanyak 16 guru. Kondisi ini tentunya menjadi permasalahan sendiri bagi Dinas Pendidikan yang ingin mewujudkan visinya sebagai yang *“Terdepan dalam Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter”* ketika kualifikasi dari tenaga pendidik yang ada belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Pendidikan yang berkualitas salah satu penting penunjang keberhasilannya adalah kecakapan dan kemampuan dari tenaga pendidik.

Pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs), jumlah guru pada SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan berjumlah 4.470 dengan kualifikasi pendidikan D-II sebanyak 16 guru, kualifikasi D-



III sebanyak 123 guru, kualifikasi S1/D4 sebanyak 3.987 guru, dan kualifikasi di atas S1 sebanyak 344 guru.

5. Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan melalui Perbaikan dan Penambahan Ruang Kelas Baru, Perpustakaan dan Laboratorium

Sarana prasarana pendidikan memberikan andil besar dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Sarana prasarana yang memadai memberikan kesempatan dan peluang bagi guru dan peserta didik untuk menggali dan mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan baru serta memperluas pengetahuan yang ada. Maka dari itu, sarana prasarana yang bermutu harus diperhatikan secara serius agar prestasi belajar siswa meningkat serta suasana belajar sekolah berjalan secara kondusif. Sejumlah upaya dalam meningkatkan mutu sarana prasarana diantaranya adalah dengan melakukan perbaikan terhadap ruang kelas yang rusak, penambahan ruang kelas baru, pemenuhan lab. IPA dan komputer, serta perpustakaan.

Ada sebanyak 136 ruang rusak berat dan 139 ruang rusak total yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah disamping juga penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung peserta didik yang ada, mengingat rasio ruang kelas saat ini adalah 1:54. Artinya bahwa 1 ruang kelas menampung sebanyak 54 anak. Kondisi ini tentunya bukanlah kondisi ideal dalam penyelenggaraan pendidikan dan jauh dari standar pelayanan minimal. Adapun pada jenjang SMP/MTs, jumlah ruang kelas SMP Negeri dan Swasta terdapat 45 ruang rusak berat dan 33 ruang rusak total. Penambahan ruang kelas baru juga harus segera dipenuhi mengingat dari data rasio ruang kelas berbanding siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bekasi adalah 1: 46,71 artinya rata-rata jumlah siswa dalam satu rombongan belajar di Sekolah Menengah Negeri di Kota Bekasi sebanyak 47 orang.

Disamping itu, dalam hal pemenuhan Laboratorium IPA di sekolah juga masih sangat minim. Hanya ada 18 sekolah dari 420 SD Negeri dan 73 SD Swasta dari 255 di Kota Bekasi yang memiliki laboratorium IPA. Idealnya adalah satu sekolah memiliki satu laboratorium IPA untuk menunjang mata pelajaran sains di sekolah.

Dari keterpenuhan laboratorium komputer juga tidak jauh berbeda, dimana masih banyak SD Negeri maupun SD swasta yang belum memiliki laboratorium



komputer. Hanya ada 111 sekolah dari 420 SD Negeri dan 177 sekolah dari 255 SD Swasta yang sudah memiliki laboratorium komputer di sekolah. Fasilitas perpustakaan sekolah juga tidak jauh berbeda, masih banyak SD Negeri maupun SD Swasta di Kota Bekasi yang belum memiliki ruang perpustakaan sehingga perlu perbaikan segera bagi perpustakaan sekolah yang rusak dan penambahan ruang perpustakaan baru bagi sekolah yang belum memiliki. Ada 10 ruang perpustakaan yang rusak berat dan 11 rusak total, 195 SD Negeri dan 66 SD Swasta yang belum memiliki perpustakaan sekolah.

6. Penguatan Kapasitas Manajemen Sekolah (*School Management Capacity*)

Peningkatan kapasitas manajemen sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mengoptimalkan berbagai komponen sekolah yang bersinergi dengan masyarakat sekitar sekolah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada. Kapasitas manajemen sekolah memfokuskan pada penguatan peran kepala sekolah sebagai leader dan manajer, *profesional communitu learning* di tingkat sekolah yang dikembangkan secara berkelanjutan, pemanfaatan IT dalam pengelolaan dan kegiatan pembelajaran serta upaya pendampingan terpadu oleh supervisor (pengawas) satuan pendidikan baik dalam bidang manajerial maupun kegiatan pembelajaran.

7. Pelestarian Budaya Lokal sebagai Penguat Pendidikan Karakter Peserta Didik

Penguatan karakter peserta didik tidak bisa lepas dari nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat yang sejatinya menjadi modal dasar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri yang selaras dengan keinginan masyarakat. Budaya yang dimanifestasikan dalam bentuk bahasa daerah, norma dan nilai, kesenian, permainan tradisional, dan artefak yang secara simbolis dapat memperkuat jati diri dan kesadaran peserta didik bahwa ia adalah bagian dari masyarakat yang syarat akan budaya keluhuran dan menjadi bagian dari pelestari budaya bagi generasi selanjutnya.

Penguatan karakter peserta didik melalui manifestasi budaya daerah harus diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara komprehensif yang tidak hanya termuat dalam struktur kurikulum, tetapi juga dalam bentuk perwujudan perilaku keseharian peserta didik di sekolah. Selain itu, pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat baik budayawan, seniman, dan pemerhati



budaya daerah perlu ditingkatkan perannya dalam membangun bersama karakter peserta didik.

8. Optimalisasi ICT sebagai *Decision Support System* dan *Executive Support System* dalam layanan Pendidikan yang berkualitas.

Mewujudkan *good governance* pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus didukung oleh kemampuan infrastruktur teknologi yang memadai dalam memperkuat layanan yang ada. Pemanfaatan teknologi dalam menunjang layanan Pendidikan di Kota Bekasi saat ini masih tergolong rendah, sejumlah layanan masih menggunakan cara konvensional sehingga efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik. ICT sebagai *decision support system* memberi peluang bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menyelenggarakan layanan prima, sistematis, dan terintegrasi dengan instansi lain. Disamping itu, dukungan akan *executive support system* memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Daerah

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan harus dapat menjawab terkait hal-hal yg perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yg dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, Visi Pembangunan Daerah Kota Bekasi adalah:

“ Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan “

Sejumlah misi yang hendak dilaksanakan dalam mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai ;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif ;
4. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2018-2023 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta visi dan misi (khususnya misi ke 3 yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif) Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPJMD



2018 - 2023. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan, maka Dinas Pendidikan mempunyai tugas yang penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan misi-misi pembangunan daerah Kota Bekasi lainnya. Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Pendidikan sebagai salah satu perangkat daerah harus melaksanakan amanat pada RPJMD dengan perumusan tujuan, dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dengan penjabaran sebagai berikut:

4.2.1 Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dinamisasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga segenap *stakeholder* pendidikan. Sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi diantaranya: 1) peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang merata dan terjangkau (peningkatan kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidik & kependidikan; 2) perluasan dan akses pendidikan yang belum merata (kebutuhan unit sekolah baru, perbaikan dan penambahan ruang kelas dan perpustakaan serta laboratorium; serta masih adanya siswa putus sekolah; 3) peningkatan mutu dan daya saing pendidikan (linearitas tenaga pendidik, kualifikasi pendidikan, akreditasi sekolah, relevansi pendidikan non-formal, dan optimalisasi peran pengawas dan masyarakat serta 4) peningkatan kualitas layanan pendidikan (sinergitas kebijakan dan program, pemanfaatan ICT, kebutuhan payung hukum pendidikan serta, keterlibatan komite sekolah).

Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi menetapkan tujuan Jangka Menengah 2018 – 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang professional dan akuntabel, dan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja lembaga.



4.2.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2018 – 2023 untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

▪ **Sasaran untuk tujuan 1 :**

Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki komitmen bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau agar segenap potensi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal dan dapat berkontribusi dalam pengembangan daerah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan sinergitas komponen dalam penyelenggaraan pendidikan yang memadai, mulai dari dukungan sarana prasarana, pemenuhan SNP, sampai pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sejumlah sasaran yang dirumuskan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan ;
2. Meningkatnya daya tampung pada lembaga pendidikan di Kota Bekasi ;
3. Meningkatnya prestasi yang diraih di tingkat Propinsi dan Nasional ;
4. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan ;
5. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kota Bekasi ;
6. Terakreditasinya lembaga pendidikan Formal dan Non formal di Kota Bekasi.

▪ **Sasaran untuk tujuan 2:**

Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat (publik) dalam bidang pendidikan memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan secara transparan program dan kegiatan internal kelembagaan agar terwujud keselarasan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga ada upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan. Sejumlah sasaran untuk mewujudkan harapan ini adalah dengan:

1. Nilai evaluasi AKIP, dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rincian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel	1 Meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	APK PAUD (3-6 tahun)	56	57	58	59	60
			APK SD	114	113,51	113,12	112,78	112,22
			APK SMP	96,74	96,91	97,25	97,75	98
			APK TK (5-6 tahun)	55,78	56,28	56,78	57,28	57,78
			APM SD	98,54	99	100	100	100
			APM SMP	83,93	84	84,35	84,65	84,86
		2 Meningkatnya daya tampung pada lembaga pendidikan di Kota Bekasi	Rasio SD Inklusi per Kecamatan	5	6	7	8	9
			Rasio SMP Inklusi per Kecamatan	2	3	4	5	6
			Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	86	88	90	92	94
			Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	97,75	97,86	97,97	98	98,2
			Angka Putus Sekolah SD	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
			Angka Putus Sekolah SMP	0,045	0,04	0,035	0,03	0,025
		3 Meningkatnya prestasi yang diraih di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	26	27	28	29	30
			Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	26	27	28	29	30
			Rerata USBN SD	81	82	83	84	85
			Rerata UN SMP	61,54	61,73	61,85	61,92	62
		4 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	64,65	64,71	64,85	64,9	65
		5 Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kota Bekasi	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1	70,5	70,9	71,3	71,7	72
			Persentase Guru yang bersertifikasi	52,22	52,43	52,6	52,75	52,95



		6	Terakreditasinya lembaga pendidikan Formal dan Non Formal di Kota Bekasi	Persentase lembaga formal terakreditasi	83,35	83,5	83,77	84,07	85,22
				Persentase lembaga Non Formal terakreditasi	33,7	36,6	38,5	39,22	40,82
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	7	Meningkatnya pelayanan pendidikan, Nilai Evaluasi AKIP dan Pengelolaan asset dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	73	75	77	79	81
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab V ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Bahasan tentang strategi dan arah kebijakan tersebut akan menunjukkan cara Dinas Pendidikan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yg menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan untuk merumuskan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu cara yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain itu menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang. Untuk menyusun strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal antara lain:

1. Analisis *Logical Frame Work* melalui *Focus Group Discussion* yang melibatkan stakeholder Internal dan Eksternal.
2. Analisis *Cascade down* dan pohon kinerja.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan berbagai metode sehingga diperoleh formulasi strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam menyusun dan melaksanakan program di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan disajikan dalam Tabel 5.1.



No.	Visi:			
	<i>Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan</i>			
	Misi Ke-4			
	<i>Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengatahuan, Sehat Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif</i>			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan pendidikan yang professional dan akuntabel	Meningkatnya Angka Parisipasi Msyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	<p>Optimalisasi pelayanan pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan bagi masyarakat & kemitraan dengan berbagai stakeholder pendidikan</p> <p>Pemberian Bea siswa dan subsidi pendidikan bagi siswa keluarga miskin</p> <p>Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, minat bakat dan tahfidz al-Qur'an</p>	Pemerataan dan perluasan akses dan kualitas pendidikan baik formal / non formal
		Meningkatnya daya tampung pada lembaga pendidikan di Kota Bekasi	<p>Optimalisasi pelayanan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (Sekolah Swasta)</p> <p>Optimalisasi pembangunan sekolah baru di jenjang SMP yang dikelola pemerintah</p>	<p>Peningkatan kualitas manajemen pendidikan (Akreditasi/ijin mendirikan sekolah baru)</p> <p>Peningkatan kuantitas sekolah baru jenjang SMP yang dikelola pemerintah</p>
		Meningkatnya Prestasi yang diraih di Tingkat Provinsi dan Nasional	Optimalisasi pembinaan penelusuran minat dan bakat siswa	<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan kuantitas event kejuaraan di bidang akademis dan non akademis di tingkat Kota • Peningkatan kualitas prasarana pendukung
		Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Optimalisasi peran masyarakat dan dunia usaha/industri untuk membantu dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk semua jenjang dan jalur • Pembuatan



No.	Visi:			
	<i>Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan</i>			
	Misi Ke-4			
	<i>Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengatahuan, Sehat Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif</i>			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peraturan walikota untuk peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi tenaga pendidik dan Kependidikan di Kota Bekasi	Optimalisasi pendanaan melalui pemberian bantuan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah	Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik
		Terakreditasinya lembaga pendidikan formal dan Non formal	Optimalisasi sarana dan prasarana dan pendampingan teknis dalam kegiatan akreditasi perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai akreditasi pada satuan pendidikan	Peningkatan kualitas lembaga pendidikan terstandarisasi nasional
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan, Nilai Evaluasi AKIP, Pengelolaan Asset dan Keuangan	Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana penunjang pelayanan • Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan dasar urusan pendidikan di Kota Bekasi, maka perlu menyusun rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penyusunan rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, sasaran dan pendanaan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pendidikan telah menetapkan program strategisnya yaitu:

1. Program Pendidikan Dasar ;
2. Program Pembinaan Pendidik dan Kependidikan ;
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ;
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
5. Program Pendidikan Non Formal ;
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ;
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam menjalankan program prioritas, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah menetapkan kegiatan prioritas yang harus dilakukan selama 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pendidikan Kota Bekasi membagi ke dalam 2 (dua) jenis kegiatan prioritas yaitu 1) *Basic Office*, dan 2) *Basic Activity*. *Basic Office* merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi seperti pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur, sarana prasarana, penyelenggaraan pembiayaan operasional kantor. *Basic Activity* merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel. 6.1



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	PENDIDIKAN				448.288.128.000	616.769.982.000,00	611.617.136.000,00	606.756.661.000,00	605.653.347.000,00	2.889.135.254.000,00								
I	BLPU				246.878.000.000	249.147.250.000,00	249.301.940.000,00	249.551.565.000,00	249.832.251.000,00	1.244.711.006.000,00								
I	1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	246.168.000.000	100	246.853.500.000	100	246.984.750.000	100	247.180.065.000	100	247.424.205.000	100	1.234.610.520.000		
	1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet		100	784.500.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	3.984.500.000		
	2	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Persentase Tersedianya Peralatan dan Tenaga		100	325.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.925.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		kebersihan kantor																
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Tersedianya alat tulis kantor	100	405.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.405.000.000			
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya barang cetak dan pengadaan	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.450.000.000			
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya peralatan komponen instalasi listrik	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	450.000.000			
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Persentase Tersedianya media cetak Surat Kabar & Majalah sebagai sarana informasi	100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	470.000.000			
	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Tersedianya makanan minuman harian pegawai, rapat dan	100	60.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	660.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		tamu																
	8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	500.000.000	100	650.000.000	100	781.250.000	100	976.565.000	100	1.220.705.000	100	4.128.520.000			
	9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran/TKK Guru	Persentase Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran, Tersedianya TKK Peningkatan status, Tersedianya Guru Agama Diperbantukan dan GBS	100	243.581.500.000	100	243.581.500.000	100	243.581.500.000	100	243.581.500.000	100	243.581.500.000	100	1.217.907.500.000			
	10	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	Persentase Vertifikasi Proposal Hibah, Sosialisasi Pembuatan LPJ,	100	20.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	420.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Monitoring Hibah dan Evaluasi Pelaksanaan																
	1 1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Tersosialisasinya informasi	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	450.000.000			
	1 2	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Persentase Terjaminnya keamanan kantor	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	360.000.000			
	I 2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saran dan Prasarana Aparatur	100	100	100	575.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	4.375.000.000			
	1 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Persentase Terpeliharanya lingkungan gedung kantor	100	250.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.250.000.000			
	1 4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Persentase Berjalannya Operasional Kantor	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.450.000.000			
	1 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Persentase Terpelihara	100	75.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	675.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Peralatan Gedung Kantor	nya peralatan gedung kantor																
I 3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	75.000.000	100	743.750.000	100	767.190.000	100	796.500.000	100	833.046.000	100	3.215.486.000			
	16 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Persentase Terpenuhi nya kebutuhan pakaian dinas			-	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.000.000.000			
	17 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Persentase Tersedianya seragam Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000			
	18 Pengadaan Pakaian Olah Raga	Persentase Tersedianya seragam olahraga			-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000			
	19 Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Jabatan Fungsional	Persentase Terlaksananya penilaian angka kredit bagi tenaga jabatan		100	75.000.000	100	93.750.000	100	117.190.000	100	146.500.000	100	183.046.000	100	615.486.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		fungsiional di Dinas Pendidikan Kota Bekasi																
I	4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100		100	375.000.000,00	100	375.000.000,00	100	375.000.000,00	100	375.000.000,00	100	1.500.000.000			
	20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Meningkatkan kompetensi SDM pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi		-	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	700.000.000			
	21	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersosialisasinya peraturan per Undang-Undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Pendidikan di Kota Bekasi		-	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	400.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2 2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Meningkatnya kemampuan teknis SDM Disdik Kota Bekasi		-	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	400.000.000			
I	5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	60.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.010.000.000		
	2 3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	20.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	370.000.000		
	2 4	Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Tersedianya Buku semesteran laporan keuangan dan Laporan Aset		100	20.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	420.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	25	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Tersedianya Buku laporan pengelolaan barang milik daerah	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	220.000.000		
	II	BLU			201.410.128.000	367.622.732.000	362.365.196.000	357.205.096.000	355.821.096.000	1.644.424.248.000							
	II	1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	APK PAUD (3 - 6 TAHUN)	%	56		57		58		59		60		60	
				Rasio TK Negeri per Kecamatan	Perb	12 : 4		12 : 5		12 : 6		12 : 7		12 : 8		12 : 8	
				TK Terakreditasi	%	20,4		21		21,6		22,2		22,8		22,8	
				Rasio Guru : Siswa PAUD	Perb	8		8		8		8		8		8	
				Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 PAUD	%	19		19,2		19,4		19,6		19,8		19,8	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan dasar peserta didik PAUD	%	100		100		100		100		100		100				
		APK TK (5 - 6 TAHUN)	%	55,78		56,28		56,78		57,28		57,78		57,78				
		Rasio Guru : Siswa TK	Perb	10		12		13		14		15		15				
					22.800.400.000	26.720.400.000		26.340.400.000		26.710.400.000		27.080.400.000		129.652.000.000				
	1	BOP PAUD (DAK)	Tersalurkan nya BOP PAUD di Kota Bekasi	37.334 Siswa	22.400.400.000	37.334 Siswa	22.400.400.000	37.334 Siswa	22.400.400.000	37.334 Siswa	22.400.400.000	37.334 Siswa	22.400.400.000	37.334 Siswa	112.002.000.000			
	2	Penyelenggaraan TK Pembina di Kota Bekasi	Tersedianya Biaya Operasional Penyelenggaraan TK Pembina di Kota Bekasi	4 TKN	400.000.000	6 TKN	600.000.000	8 TKN	800.000.000	10 TKN	1.000.000.000	12 TKN	1.200.000.000	12 TKN	4.000.000.000			
	3	Porseni PAUD, Lomba Gugus dan Kelembagaan PAUD	Terlaksananya Porseni PAUD, Diraihnya Prestasi		-	3 Event	200.000.000	3 Event	300.000.000	3 Event	300.000.000	3 Event	300.000.000	3 Event	1.100.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Dalam Bidang Olahraga dan Seni Bagi Peserta Didik PAUD, Lembaga Gugus dan Kelembagaan PAUD																
	4	Pelaksanaan Lomba Kreatifitas Guru dan Tutor PAUD	Terlaksananya Lomba Kreatifitas Guru PAUD		-	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.000.000.000			
	5	Pemberian insentif beasiswa penyetaraan S1 PAUD	Meningkatnya kompetensi pendidikan Guru PAUD di Kota Bekasi		-	50	900.000.000	100	900.000.000	150	900.000.000	200	900.000.000	800	3.600.000.000			
	6	Pengadaan Sarana TK Negeri di Kota Bekasi	Terpenuhinya kebutuhan sarana yang representatif pada TK Negeri di Kota Bekasi		-	6	300.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	9	600.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7	Pengadaan Sarana Meubelair untuk PAUD	Tersedianya Meubelair sebagai sarana pendidikan yang merata dan layak secara fisik		-	34 PAUD	170.000.000	68 PAUD	340.000.000	102 PAUD	510.000.000	136 PAUD	680.000.000	340 PAUD	1.700.000.000		
	8	Pembangunan Tk Negeri di Kota Bekasi	Tersedianya Bangunan TK Negeri baru di Kota Bekasi		-	1 TKN	1.000.000.000	1 TKN	1.000.000.000	1 TKN	1.000.000.000	1 TKN	1.000.000.000	1 TKN	4.000.000.000		
	9	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Gedung TK Negeri di Kota Bekasi	Tersedianya ruang kelas dan gedung TK Negeri yang representatif di Kota Bekasi		-	3 TKN	900.000.000		-		-		-		900.000.000		
	10	Pembinaan dan pendampingan TK yang akan akreditasi	Meningkatnya kemampuan managerial bagi pengelola PAUD		-		-	100 TK	100.000.000	100 TK	100.000.000	100 TK	100.000.000	300 TK	300.000.000		
	11	Penyetaraan S1 PAUD bagi guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan.	Meningkatnya kualifikasi pendidikan		-		-	100 org	150.000.000	100 org	150.000.000	100 org	150.000.000	300 org	450.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Prestasi yang diraih di tingkat propinsi dan atau nasional Tingkat SMP	25	26		27		28		29		30		30				
		Rasio Sekolah SD Inklusi per Kecamatan	12 : 4	12 : 5		12 : 6		12 : 7		12 : 8		12 : 9		12 : 9				
		Rasio Sekolah SMP Inklusi per Kecamatan	12 : 1	12 : 2		12 : 3		12 : 4		12 : 5		12 : 6		12 : 6				
		Daya Tampung SD/MI (Negeri+Swasta)	112,83	108		106		103		101		100		100				
		Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta)	84,72	85		86		87		88		89		89				
		Rasio Rombel SD : siswa SD (SPM 1:32) Negeri+Swasta	30	32		32		32		32		32		32				



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Rasio Rombel SMP : Siswa SMP : (SPM 1:36) Negeri+Swasta	33	34		35		36		36		36		36				
		APM SD/MI	97,27	98,54		99		100		100		100		100				
		APM SMP/MTs	83,82	83,93		84		84,35		84,65		84,86		84,86				
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,0007	0,0001		0,0001		0,0001		0,0001		0,0001		0,0001				
		Daya Tampung SD/MI (Negeri)	67,96	68		68,5		67		67,5		68		68				
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03	0,045		0,04		0,035		0,03		0,025		0,025				
		Daya Tampung SMP/MTs (Negeri)	37,69	38		39		40		41		42		42				
		Rasio siswa SD : rombel (SPM 1:32) Negeri	33	32		32		32		32		32		32				



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rasio siswa SMP : rombel (SPM 1:36) Negeri	40	40		39		38		37		36		36			
		Rasio Ruang Kelas : Rombel SD (Negeri)	1 : 1,3	1 : 1,2		1 : 1,2		1 : 1,1		1 : 1,1		1 : 1		1 : 1			
		Rasio Ruang Kelas : Rombel SMP (Negeri)	1 : 1,17	1 : 1,16		1 : 1,15		1 : 1,14		1 : 1,13		1 : 1,12		1 : 1,12			
		Angka kelulusan USBN	100	100		100		100		100		100		100			
		Angka kelulusan SMP	100	100		100		100		100		100		100			
					133.391.172.000	136.378.996.000	137.674.996.000	139.370.996.000	140.666.996.000	687.483.156.000							
1	Penyelenggaraan operasional pendidikan pada SDN se Kota Bekasi	Terselenggaranya pengelolaan operasional pendidikan (BOSDA pd SDN se Kota Bekasi		174.652 siswa, 418 SDN	58.683.072.000	173.586 siswa	58.324.896.000	173.586 siswa	58.324.896.000	173.586 siswa	58.324.896.000	173.586 siswa	58.324.896.000	173.586 siswa	291.982.656.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	Penyelenggaraan operasional pada SD Swasta se Kota Bekasi	Terselenggaranya pengelolaan operasional pendidikan (BOSDA pd SD Swasta se Kota Bekasi	179 SDS	10.645.960.000	179 SDS	10.645.960.000	179 SDS	10.645.960.000	179 SDS	10.645.960.000	179 SDS	10.645.960.000	179 SDS	53.229.800.000		
	3	Penyelenggaraan operasional pendidikan pada SMPN se Kota Bekasi	Terselenggaranya pengelolaan operasional pendidikan (BOSDA pd SMPN se Kota Bekasi	47.95 siswa, 49 SMPN	51.510.600.000	59	52.806.600.000	59	54.102.600.000	59	55.398.600.000	59	56.694.600.000	59	270.513.000.000		
	4	Penyelenggaraan operasional pendidikan pada SMPS se Kota Bekasi	Terselenggaranya pengelolaan operasional pendidikan (BOSDA pd SMP Swasta se Kota Bekasi	116 SMPS	9.351.540.000	116 SMP S	46.757.700.000										
	5	Penyelenggaraan USBN SD di Kota Bekasi	Terlaksananya UN SD/MI	4200 siswa	600.000.000	4200 siswa	900.000.000	4200 siswa	4.200.000.000								
	6	Penyelenggaraan UN SMP di Kota Bekasi	Terlaksananya UN SMP	3200 siswa	150.000.000	3200 siswa	1.000.000.000	3200 siswa	4.150.000.000								



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				a														
	7	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Kota Bekasi dan Prop. Jabar	Terselenggaranya OSN SD Tk.Kota Bekasi dan terwakilinya Tim OSN Tk. Kota Bekasi dalam OSN Tk.Provinsi,	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	500.000.000			
	8	Olimpiade Sains Nasional (OSN)SMP Tingkat Kota Bekasi dan Prop. Jabar	Terselenggaranya OSN SMP Tk.Kota Bekasi dan terwakilinya Tim OSN Tk. Kota Bekasi dalam OSN Tk.Provinsi,	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	100.000.000	3 Cabang 2 Event	500.000.000			
	9	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Bekasi dan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya Pelaksanaan O2SN SD Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan/atau	8 Cab or 2 Event	200.000.000	8 Cab or 2 Event	200.000.000	8 Cab or 2 Event	200.000.000	8 Cab or 2 Event	200.000.000	8 Cab or 2 Event	200.000.000	8 Cab or 2 Event	1.000.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Provinsi Diraihnya atlet kota Bekasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat																
	10	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tk. Kota Bekasi/Propinsi	Terpilihnya Juara Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP Tk.Kota Bekasi, Ikut sertanya Kota Bekasi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP Tk.Provinsi Jawa Barat 8 cab smp		-	10 Cabor 2 Event	100.000.000	10 Cabor 2 Event	100.000.000	10 Cabor 2 Event	500.000.000	10 Cabor 2 Event	500.000.000	10 Cabor 2 Event	1.200.000.000			
	11	Revitalisasi Sekolah Inklusi pada SD dan SMP di Kota Bekasi	Berfungsinya kembali Sekolah Inklusi pada SD dab		-	1 SD dan 1 SMP	200.000.000	1 SMP	200.000.000	1 SMP	200.000.000	1 SMP	200.000.000	1 SMP	800.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		SMP di Kota Bekasi																
	1 2	Pelaksanaan lomba Calistung dan Baca Al Quran Tingkat SD se Kota Bekasi	Terlaksananya Lomba Calistung dan Lomba Baca Al - Quran Tingkat SD di Kota Bekasi.		-	siswa kelas 1 sd 5 SD 12 Kec	150.000.000	siswa kelas 1 sd 5 SD 12 Kec	150.000.000	siswa kelas 1 sd 5 SD 12 Kec	150.000.000	siswa kelas 1 sd 5 SD 12 Kec	150.000.000	siswa kelas 1 sd 5 SD 12 Kec	600.000.000			
	1 3	Bea siswa Berprestasi Jenjang SD, SMP dan Bantuan Pendidikan Habidz Qur'an Tingkat Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat	Terlaksananya Seleksi Siswa SD Berprestasi Tingkat Kota Bekasi		2.050.000.000	Kelas IV dan V SD	10.250.000.000											
	1 4	Pemilihan siswa Berprestasi Jenjang SD dan SMP Tingkat Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat	Terlaksananya Seleksi Siswa SD dan SMP Berprestasi Tingkat Kota Bekasi dan terwakilinya Kota Bekasi di Tk. Propinsi		-	2 Event	200.000.000	8 kegiatan	800.000.000									



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	15	Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa SMP Peraih Nilai UN Tertinggi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa SMP Peraih Nilai UN Tertinggi di Kota Bekasi		-	10 siswa dan 10 SMP peraih UN Tertinggi	150.000.000	10 siswa dan 10 SMP peraih UN Tertinggi	150.000.000	10 siswa dan 10 SMP peraih UN Tertinggi	150.000.000	10 siswa dan 10 SMP peraih UN Tertinggi	150.000.000	10 siswa dan 10 SMP peraih UN Tertinggi	600.000.000		
	16	Lomba Literasi bagi siswa SD dan SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca dikalangan siswa sekolah di Kota Bekasi		-	15 SD & 5 SMP	100.000.000	15 SD & 5 SMP	400.000.000								
	3	PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SD yang bersertifikasi	61,48	61,68	61,88		62		62,2		62,4		62,4			
			Persentase Guru SMP yang bersertifikasi	57,13	57,53	57,85		58		58,2		58,4		58,4			
			Persentase Guru SD yang	94,93	95	95,5		96		96,5		97		97			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		memenuhi kualifikasi S1 PGSD																
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi D4/S1	97,03	97,5		98		98,5		99		99,2		99,2				
		Persentase SD yang memiliki Tenaga Kependidikan	71,1	78		78,5		79		79,5		80		80				
					708.286.000		50.333.000.000		50.783.000.000		50.783.000.000		50.783.000.000		203.390.286.000			
	1	Peningkatan Kinerja Guru Honor SD/SMP Swasta	Meningkatnya Proses Pembelajaran Guru pada SD/SMP Swasta			4311 guru x 12 bln x 350 rb	18.108.000.000	4311 guru x 12 bln x 350 rb	18.108.000.000	4311 guru x 12 bln x 350 rb	18.108.000.000	4311 guru x 12 bln x 350 rb	18.108.000.000	4311 guru x 12 bln x 350 rb	72.432.000.000			
	2	Peningkatan Kinerja Guru Honor RA/MA/MTs/MA/TP Q/DTA Swasta	Meningkatnya Proses Pembelajaran Guru pada RA/MA/MTs/MA/TP Q/DTA Swasta			4278 guru x 12 bln x 500 rb	25.668.000.000	4278 guru x 12 bln x 500 rb	25.668.000.000	4278 guru x 12 bln x 500 rb	25.668.000.000	4278 guru x 12 bln x 500 rb	25.668.000.000	4278 guru x 12 bln x 500 rb	102.672.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui KKG	Meningkatnya Kompetensi Guru SD dalam pemahaman dan aplikasi Kurikulum 2013	150 guru x 2 smt	300.000.000	150 guru x 2 smt	350.000.000	150 guru	1.700.000.000								
	4	Peningkatan Kompetensi Guru SMP Melalui MGMP	Meningkatnya Kompetensi Guru SMP Melalui MGMP	250 guru x 2 smt	408.286.000	250 guru x 2 smt	450.000.000	250 guru x 2 smt	2.208.286.000								
	5	Olimpiade Guru Mata Pelajaran Tingkat Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat	Terpilih dan meningkatnya kompetensi Guru Mata Pelajaran di Kota Bekasi dan terwakilinya Kota Bekasi pada event Olimpiade Guru Mata Pelajaran Tingkat Provinsi Jawa Barat	-		2 event 12 kec 49 SMP N 222 SMP S	300.000.000	2 event 12 kec 49 SMP N 222 SMP S	300.000.000	2 event 12 kec 49 SMP N 222 SMP S	300.000.000	2 event 12 kec 49 SMP N 222 SMP S	300.000.000	2 event 12 kec 49 SMP N 222 SMP S	1.200.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Pelatihan Penilaian Tindakan Kelas Bagi Guru SD dan SMP	Meningkatnya kemampuan Guru SD dan SMP dalam penilaian penelitian tindakan kelas		-	150 org x 2 hari	300.000.000		1.200.000.000								
	7	Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas SD dan SMP	Meningkatnya kemampuan manajerial dan Kompetensi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas SD dan SMP		-	20 Keps dan Pengawas standar LP2 KS Solo	350.000.000	20 Keps dan Pengawas standar LP2 KS Solo	350.000.000	20 Keps dan Pengawas standar LP2 KS Solo	350.000.000	20 Keps dan Pengawas standar LP2 KS Solo	350.000.000		1.400.000.000		
	8	Diklat Calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Pengawas TK	Meningkatnya kemampuan manajerial dan Kompetensi Calon Kepala TK dan Pengawas TK		-			50 org	150.000.000	50 org	150.000.000	50 org	150.000.000	150 org	450.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9	Workshop Penguatan Listerasi dan Perintis Komunikasi Listerasi Sekolah	Terselenggaranya Listerasi disekolah sebagai budaya minat baca siswa dalam pembentukan karakter		-	150 org x 2 hari	300.000.000		1.200.000.000								
	10	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD, SMP dan DPK	Tersedianya data dan informasi tentang Kinerja Kepala Sekolah SD, SMP dan DPK di Kota Bekasi sebagai bahan pengambilan kebijakan		-	417 SDN 49 SMP N	300.000.000		1.200.000.000								
	11	Peningkatan Kompetensi Guru PAI pada SD/MI, SMP/MTs di Kota Bekasi	Meningkatnya Kompetensi Guru PAI pada SD/MI, SMP/MTs di Kota Bekasi		-	150 org x 2 hari	300.000.000		1.200.000.000								



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1 2	Pelatihan Pustakawan / Tenaga Perpustakaan pada SD dan SMP di Kota Bekasi	Meningkatnya kemampuan pengelolaan perpustakaan bagi Pustakawan / petugas perpustakaan pada SD dan SMP di Kota Bekasi		-	150 org x 2 hari	300.000.000	150 org x 2 hari	1.200.000.000								
	1 3	Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah	Terlaksananya Kompetensi bagi Guru-Guru Madrasah		-	150 org x 2 hari	300.000.000	150 org x 2 hari	1.200.000.000								
	1 4	Peningkatan Kompetensi Guru Non PNS	Peserta Peningkatan Kompetensi Guru Non PNS, Terselenggara Peningkatan bagi Guru Non PNS		-	150 org x 2 hari	300.000.000	150 org x 2 hari	1.200.000.000								
	1 5	Pelatihan Pembuatan Materi Pengajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TIK SMP	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Materi		-	150 org x 2 hari	300.000.000	150 org x 2 hari	1.200.000.000								



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Pengajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TIK SMP																
	16	Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi untuk SD dan SMP Tingkat Kota Bekasi	Terpilihnya Guru SD/ SMP dan Kepala Sekolah berprestasi Tk.Kota Bekasi dan ikut Serta Kontingen Kota Bekasi dalam Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi jenjang SD/SMP Tk.Propinsi		-	2 event 12 kec	150.000.000	2 event 12 kec	600.000.000									
	17	Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pemberdayaan Sekolah bagi Kepala Sekolah dan Pengawas	Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah		-	23 SMP, 278 SD, 1 Pengawas	1.057.000.000	23 SMP, 278 SD, 1 Pengawas	1.057.000.000	23 SMP, 278 SD, 1 Pengawas	1.057.000.000	23 SMP, 278 SD, 1 Pengawas	1.057.000.000	23 SMP, 278 SD, 1 Pengawas	4.228.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Sekolah Kota Bekasi																	
18	Pemilihan Lomba Best Practice Bagi Pengawas Sekolah SD dan SMP	Terpilihnya Pengawas SD dan SMP yang berprestasi dan memiliki kompetensi.			-	34 pengawas SMP 65 Pengawas SD	300.000.000	34 pengawas SMP 65 Pengawas SD	300.000.000	34 pengawas SMP 65 Pengawas SD	300.000.000	34 pengawas SMP 65 Pengawas SD	300.000.000	34 pengawas SMP 65 Pengawas SD	1.200.000.000			
19	Pelatihan bagi Guru Kesenian Daerah di Kota Bekasi	Terlatihnya guru kesenian di Kota Bekasi terhadap seni budaya lokal			-	75 org x 2 hr	150.000.000	75 org x 2 hr	600.000.000									
20	Pelatihan bagi Guru Bimbingan Karier (BK) di Sekolah Kota Bekasi	Meningkatnya peran Guru BK dalam melaksanakan konseling kepada remaja di Sekolah Kota Bekasi			-	100 org guru BK SMP	200.000.000	100 org guru BK SMP	800.000.000									



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Peningkatan Managerial Pengelola PAUD	Meningkatnya Managerial Pengelola PAUD yang Berkualitas			-	200 Peserta	200.000.000	250 Peserta	800.000.000								
22	Peningkatan Kompetensi Tutor PAUD di Kota Bekasi	Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD di Kota Bekasi			-	200 Peserta	200.000.000	250 Peserta	800.000.000								
23	Workshop Peningkatan Kompetensi Penilik PAUD dan Dikmas Kota Bekasi	Meningkatnya kompetensi Penilik Dikmas di Kota Bekasi			-	27 Penilik x 3 hari	150.000.000	27 Penilik x 3 hari	600.000.000								
24	Seleksi dan Diklat Calon Penilik Dikmas di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Penilik Dikmas di Kota Bekasi			-	72 org	300.000.000		1.200.000.000								
25	Beasiswa Penyetaraan S1 PGSD bagi guru SD yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan.	Meningkatnya kualifikasi pendidikan guru SD			-			100 org	150.000.000	100 org	150.000.000	100 org	150.000.000	300 org	450.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	Bea siswa Penyetaraan S1 per mata pelajaran bagi guru SMP yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan.	Meningkatnya kualifikasi pendidikan guru SMP yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya		-		-	100 org	150.000.000	100 org	150.000.000	100 org	150.000.000	300 org	450.000.000		
	II	4	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Cakupan Pelayanan Berbasis IT	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9			
				Persentase Peningkatan layanan Pendidikan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	64,45	64,65	64,71	64,85	64,9	65	65	65	65	65			
				Jumlah SD memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer	66,52	66,72	66,92	67	67,2	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		(Negeri+Swasta)																
		Jumlah SD memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)	36,69	36,89		37		37,2		37,4		37,6		37,6				
		Jumlah SD memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)	72,68	72,88		73		73,22		73,42		73,62		73,62				
		Jumlah SD memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri)	64,99	65		65,5		70		70,5		71		71				
		Jumlah SMP memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)	72	72,5		73		73,5		74		74,5		74,5				



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Jumlah SMP memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri)	72,45	73		73,5		74		74,5		75		75				
		Jumlah SMP memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)	84,73	85		85,5		86		86,5		87		87				
		Jumlah SMP memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri)	83,67	84		84,5		85		85,5		86		86				
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	100	100		100		100		100		100		100				



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	100	100		100		100		100		100		100				
		Persentase SD berakreditasi A		89,85		90		90,25		90,4		90,45		90,45				
		Persentase SMP berakreditasi A		76,85		77		77,3		77,75		80		80				
					26.800.000.000		129.114.836.000		122.540.800.000		118.340.800.000		115.240.800.000		511.937.236.000			
	1	Pelayanan Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di Kota Bekasi	1 event	417 SDN, 49 SMPN	300.000.000	417 SDN, 49 SMPN, 10 USB SMPN	500.000.000	417 SDN, 49 SMPN, 10 USB SMPN	600.000.000	417 SDN, 49 SMPN, 10 USB SMPN	600.000.000	417 SDN, 49 SMPN, 10 USB SMPN	600.000.000	417 SDN, 49 SMPN, 10 USB SMPN	2.600.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	Terpeliharanya aplikasi Ensys Dinas Pendidikan diseluruh sekolah serta terlatihnya para operator di sekolah dan tersedianya data yang up to date		workshop operator 150 org x 2 hari dan pengembangan aplikasi 1 pkt	400.000.000	workshop operator 150 org x 2 hari dan pengembangan aplikasi 1 pkt	400.000.000	workshop operator 150 org x 2 hari dan pengembangan aplikasi 1 pkt	400.000.000	workshop operator 150 org x 2 hari dan pengembangan aplikasi 1 pkt	400.000.000	workshop operator 150 org x 2 hari dan pengembangan aplikasi 1 pkt	400.000.000	workshop operator 150 org x 2 hari dan pengembangan aplikasi 1 pkt	2.000.000.000		
	3	Terselenggaranya Rapat Kerja Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi dan tersusunya perencanaan kinerja (Renja) untuk tahun yad			-	1 Raker Disdik, 1 Forum OPD, Peny Renja, 80 org	250.000.000	1 Raker Disdik, 1 Forum OPD, Peny Renja, 80 org	250.000.000	1 Raker Disdik, 1 Forum OPD, Peny Renja, 80 org	250.000.000	1 Raker Disdik, 1 Forum OPD, Peny Renja, 80 org	250.000.000	1 Raker Disdik, 1 Forum OPD, Peny Renja, 80 org	1.000.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	Penyusunan Profil Pendidikan	Tersusunnya Profil Pendidikan Kota Bekasi		-	Analisa data dan cetak 300 exp	75.000.000	Analisa data dan cetak 300 exp	75.000.000	Analisa data dan cetak 300 exp	75.000.000	Analisa data dan cetak 300 exp	75.000.000	Analisa data dan cetak 300 exp	300.000.000		
	5	Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi e-Monev Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Terpeliharanya aplikasi E-Monev Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan tersedianya laporan realisasi pembangunan pendidikan di Kota Bekasi		-	417 SDN 49 SMP N	375.000.000	417 SDN 49 SMP N	400.000.000	417 SDN 49 SMP N	400.000.000	417 SDN 49 SMP N	400.000.000	417 SDN 49 SMP N	1.575.000.000		
	6	Pemberian Bantuan Operasional kepada SMA/MA/SMK Negeri di Kota Bekasi	Terselenggaranya pengelolaan operasional pendidikan (BOSDA pd SMA/SMKN) se Kota Bekasi		-	35.645 siswa x 12 bln x 170 rb	72.715.800.000	35.645 siswa x 12 bln x 170 rb	72.715.800.000	35.645 siswa x 12 bln x 170 rb	72.715.800.000	35.645 siswa x 12 bln x 170 rb	72.715.800.000	35.645 siswa x 12 bln x 170 rb	290.863.200.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7	Pemberian Beasiswa untuk siswa miskin SMP Swasta di Kota Bekasi	Tersalurkannya Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP Swasta di Kota Bekasi	3000 siswa	2.900.000.000	3000 siswa	3.200.000.000	3000 siswa	15.700.000.000								
	8	Pemberian Bantuan Pendidikan untuk warga Kota Bekasi yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi	Meningkatnya mahasiswa warga Kota Bekasi yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi	150 Siswa	1.000.000.000	150 Siswa	1.000.000.000	150 Siswa	1.000.000.000	150 Siswa	1.000.000.000	150 Siswa	1.000.000.000	150 Siswa	5.000.000.000		
	9	Pelaksanaan Evaluasi Penerapan SPM Pendidikan dan Evaluasi Diri Sekolah di Kota Bekasi	Terukurnya ketercapaian SPM Pendidikan dan Evaluasi Diri Sekolah di Kota Bekasi	5 Jenis	250.000.000	5 Jenis	250.000.000	5 Jenis	250.000.000	5 Jenis	250.000.000	5 Jenis	250.000.000	5 Jenis	1.250.000.000		
	10	Penataan Arsip Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Tertatanya arsip pada Dinas Pendidikan	100	700.000.000	100	400.000.000	100	300.000.000	100	200.000.000	100	100.000.000	100	1.700.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kota Bekasi															
	11	Pengadaan Sarana dan Mebeulair Sekolah Disabilitas	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan mebeulair sekolah Disabilitas di Kota Bekasi	6 RKB TK, 6 RKB SD dan 6 RKB SMP	1.100.000.000	-		6 RKB TK, 6 RKB SD dan 6 RKB SMP	1.100.000.000	6 RKB TK, 6 RKB SD dan 6 RKB SMP	1.100.000.000	6 RKB TK, 6 RKB SD dan 6 RKB SMP	1.100.000.000	6 RKB TK, 6 RKB SD dan 6 RKB SMP	4.400.000.000			
	12	Pengadaan Meubelair SD Negeri di Kota Bekasi	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kelas SD Negeri di Kota Bekasi	118 Ruang Kelas	11.000.000.000	85 Ruang	8.000.000.000	60 Ruang	6.000.000.000	40 Ruang	4.000.000.000	20 Ruang	2.000.000.000	20 Ruang	31.000.000.000			
	13	Pengadaan Mebeulair SMP Negeri di Kota Bekasi	Terlaksananya pengadaan Meubelair Kelas SMP Negeri di Kota Bekasi	96 Ruang Kelas	9.000.000.000	-		68 Ruang Kelas	7.000.000.000	44 Ruang Kelas	5.000.000.000	32 Ruang Kelas	4.000.000.000	32 Ruang Kelas	25.000.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	14	Pengadaan Sarana TK Negeri di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan sarana yang representatif pada TK Negeri di Kota Bekasi	5 TKN	150.000.000	5 TKN	150.000.000	6 TKN	150.000.000	7 TKN	150.000.000	8 TKN	150.000.000	8 TKN	750.000.000		
	15	Pengadaan Komputer dan Server UNBK SMP Negeri	Terpenuhiya kebutuhan Komputer dan Server UNBK SMP Negeri		-	2400 PC & 116 server	24.891.900.000	3 SMP USB	3.000.000.000	3 SMP USB	3.000.000.000	3 SMP USB	3.000.000.000	3 SMP USB	33.891.900.000		
	16	Pengadaan Komputer dan Server UNBK SD Negeri di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Komputer dan Server UNBK SD Negeri		-	6 SDN	6.000.000.000	5 SDN	6.000.000.000	5 SDN	6.000.000.000	4 SDN	6.000.000.000	4 SDN	24.000.000.000		
	17	Pengadaan Laboratorium IPA untuk SD di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Laboratorium IPA untuk SD di Kota Bekasi		-	3 SDN	1.000.000.000	3 SDN	1.000.000.000	2 SDN	1.000.000.000	2 SDN	1.000.000.000	2 SDN	4.000.000.000		
	18	Pengadaan Laboratorium Komputer untuk SD di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Laboratorium		-	2 SDN	1.000.000.000	2 SDN	1.000.000.000	2 SDN	1.000.000.000	2 SDN	1.000.000.000	2 SDN	4.000.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		m Komputer untuk SD di Kota Bekasi																
	19	Pengadaan Alat Peraga IPA untuk SD di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Alat Peraga IPA untuk SD di Kota Bekasi		-	30 SDN	1.000.000.000	28 SDN	1.000.000.000	25 SDN	1.000.000.000	25 SDN	1.000.000.000	25 SDN	4.000.000.000			
	20	Pengadaan Sarana Kesenian untuk SD Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Alat Kesenian untuk SD di Kota Bekasi		-	65 SDN	1.000.000.000	55 SDN	1.000.000.000	52 SDN	1.000.000.000	50 SDN	1.000.000.000	50 SDN	4.000.000.000			
	21	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD Negeri di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Meubelair perpustakaan untuk SD di Kota Bekasi		-	45 SDN	1.000.000.000	40 SDN	1.000.000.000	35 SDN	1.000.000.000	30 SDN	1.000.000.000	30 SDN	4.000.000.000			
	22	Pengadaan Sarana Olahraga untuk SD Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Alat Olahraga untuk SD di Kota Bekasi		-	62 SDN	1.000.000.000	55 SDN	1.000.000.000	52 SDN	1.000.000.000	50 SDN	1.000.000.000	50 SDN	4.000.000.000			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	23	Pengadaan Laboratorium IPA SMP di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Laboratorium IPA untuk SMP di Kota Bekasi		-		-	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	3.000.000.000		
	24	Pengadaan Laboratorium Bahasa Dan Komputer pada SMP di Kota Bekasi	Tersedianya Laboratorium Bahasa Dan Komputer pada SMP di Kota Bekasi		-		-	4 Sekolah USB SMP	1.000.000.000	4 Sekolah USB SMP	1.000.000.000	4 Sekolah USB SMP	1.000.000.000	4 Sekolah USB SMP	3.000.000.000		
	25	Pengadaan Laboratorium Komputer untuk SMP di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Laboratorium Komputer untuk SMP di Kota Bekasi		-		-	4 Sekolah USB SMP	1.000.000.000	4 Sekolah USB SMP	1.000.000.000	4 Sekolah USB SMP	1.000.000.000	4 Sekolah USB SMP	3.000.000.000		
	26	Pengadaan Sarana Kesenian untuk SMP Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Alat Kesenian untuk SMP di Kota Bekasi		-	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	4.000.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	27	Pengadaan Sarana Olahraga untuk SMP Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Alat Olahraga untuk SMP di Kota Bekasi		-	44 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	4.000.000.000								
	28	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SMP Negeri di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan mebelair perpustakaan untuk SMP di Kota Bekasi		-	44 Sekolah SMP	1.907.136.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	4.907.136.000		
	29	Pengadaan Sarana Perpustakaan Digital untuk SMP Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan sarana perpustakaan digital untuk SMP di Kota Bekasi		-			58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	3.000.000.000		
	30	Pengadaan Sarana Proyektor Kelas untuk SMP Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan proyektor kelas untuk SMP di Kota Bekasi			58 Sekolah SMP	1.000.000.000	58 Sekolah SMP	4.000.000.000								



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	Pengadaan Perpustakaan Sesuai Standar pada SD dan SMP di Kota Bekasi	Terpenuhiya Kebutuhan Perpustakaan Sesuai Standar pada SD dan SMP di Kota Bekasi			-	-		3 SDN & 3 SMP N	1.000.000.000	3 SDN & 3 SMP N	1.000.000.000	3 SDN & 3 SMP N	1.000.000.000	3 SDN & 3 SMP N	3.000.000.000		
32	Pengadaan Buku Pengayaan dan Buku referensi untuk perpustakaan pada SD dan SMP di Kota Bekasi	Terpenuhiya Kebutuhan Buku Pengayaan dan Buku referensi untuk perpustakaan pada SD dan SMP di Kota Bekasi			-	-		3 SDN & 3 SMP N	1.000.000.000	3 SDN & 3 SMP N	1.000.000.000	3 SDN & 3 SMP N	1.000.000.000	3 SDN & 3 SMP N	3.000.000.000		
33	Pengadaan Alat Peraga Rumpun Sains untuk SD dan SMP di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Alat Peraga Rumpun Sains untuk SD dan SMP di Kota Bekasi			-	-		15 SDN & 15 SMP N	1.000.000.000	15 SDN & 15 SMP N	1.000.000.000	15 SDN & 15 SMP N	1.000.000.000	15 SDN & 15 SMP N	3.000.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34	Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Rumpun Keterampilan untuk SD dan SMP di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Alat Peraga Pembelajaran Rumpun Keterampilan untuk SD dan SMP di Kota Bekasi		-		-	12 SDN & 12 SMPN	1.000.000.000	12 SDN & 12 SMPN	1.000.000.000	12 SDN & 12 SMPN	1.000.000.000	12 SDN & 12 SMPN	3.000.000.000		
	35	Pengadaan Alat Peraga Rumpun Sosial untuk SD dan SMP di Kota Bekasi	Terpenuhiya Alat Peraga Rumpun Sosial untuk SD dan SMP di Kota Bekasi		-		-	15 SDN & 15 SMPN	1.000.000.000	15 SDN & 15 SMPN	1.000.000.000	15 SDN & 15 SMPN	1.000.000.000	15 SDN & 15 SMPN	3.000.000.000		
	36	Pengadaan Media pembelajaran Interaktif untuk SD dan SMP di Kota Bekasi	Tersediannya Media pembelajaran Interaktif untuk SD/SMP di Kota Bekasi		-		-	10 SDN & 10 SMPN	1.000.000.000	10 SDN & 10 SMPN	1.000.000.000	10 SDN & 10 SMPN	1.000.000.000	10 SDN & 10 SMPN	3.000.000.000		
	37	Pembinaan dan pendampingan SD dan SMP yang akan akreditasi	Meningkatnya kemampuan managerial bagi pengelola SD dan SMP		-		-	100 sekolah	100.000.000	100 sekolah	100.000.000	100 sekolah	100.000.000	300 sekolah	300.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I I 5	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	Persentase LPK yang memiliki ijin	54,71	56,10		58,54		60,49		62,44		64,39		64,39			
		Persentase Daya Tampung PKBM terhadap siswa putus sekolah /siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	N/A	120		118		117		116		115		115			
		Persentase PKBM Terakreditasi	27,45	29,16		33,43		35,97		36,11		38,04		38,04			
		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dasar anak usia pendidikan non formal	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Tutor dengan	100	100		100		100		100		100		100			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		kualifikasi akademik D4/S1																
		Persentase LPK yang Terakreditasi	8,59	8,81		9		9,35		9,65		10		10				
		Persentase PKBM yang memiliki ijin	100	100		100		100		100		100		100				
					17.710.270.000		25.075.500.000		25.126.000.000		21.999.900.000		22.049.900.000		111.961.570.000			
	1	Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Kejar Paket A, B, C	Terselenggaranya Ujian Kesetaraan Paket A, B, C di Kota Bekasi	4.039 Siswa	150.000.000	3.992 Siswa	150.000.000	3992 siswa	150.000.000	387 Siswa	150.000.000	389 Siswa	150.000.000	389 Siswa	750.000.000			
	2	Penarikan kembali (Retrieval) Calon Warga Belajar Paket A, Paket B dan C yang tidak mampu	Meningkatnya jumlah Warga Belajar yang tidak mampu pada Kesetaraan Paket B dan C di Kota		-	30 org x 12 Kec	800.000.000	30 org x 12 Kec	3.200.000.000									



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Bekasi																
	3	BOP Kesetaraan	Terselenggaranya pengelolaan operasional pendidikan (BOSDA) pd pendidikan kesetaraan di Kota Bekasi	8,814	6.344.270.000	8814	7.159.500.000	8880	7.210.000.000	8910	7.233.900.000	8910	7.233.900.000	8910	35.181.570.000			
	4	Peningkatan Kinerja Tutor PAUD dan PKBM/TBM	Meningkatnya kinerja Tutor PAUD dan PKBM/TBM di Kota Bekasi	300	10.716.000.000	300	10.716.000.000	300	10.716.000.000	300	10.716.000.000	300	10.716.000.000	300	53.580.000.000			
	5	Peningkatan Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan di Kota Bekasi	Meningkatnya Kompetensi Pedagogik Tutor Paket A, B, C dan Pendidik Kursus		-	30 org	300.000.000	120 org	1.200.000.000									



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Peningkatan Kompetensi Penilik PAUD Dikmas di Kota Bekasi	Meningkatnya kompetensi Penilik PAUD Dikmas di Kota Bekasi		-	30 org	300.000.000	30 org	300.000.000	30 org	300.000.000	30 org	300.000.000	30 org	1.200.000.000		
	7	Pendampingan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM dan LKP) di Kota Bekasi	Terselenggaranya Akreditasi PKBM dan LKP di Kota Bekasi		-	15 Lembaga	100.000.000	10 Lembaga	100.000.000	10 Lembaga	100.000.000	10 Lembaga	100.000.000	10 Lembaga	400.000.000		
	8	Peningkatan Managerial Pengelola SKB, PKBM dan LKP	Meningkatnya kemampuan managerial Pengelola PKBM dan LKP		-	150 lemb	100.000.000	150 lemb	100.000.000	100 lemb	100.000.000	100 lemb	100.000.000	500 lemb	400.000.000		
	9	Pembangunan Gedung SKB Kota Bekasi	Terbangunnya Gedung SKB sebagai sarana pelayanan pendidikan Non Formal di Kota Bekasi		-	800 m2	3.200.000.000	800 m2	3.200.000.000		-				6.400.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Peringatan Hari Pendidikan dan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Bekasi dan Prop. Jawa Barat	Terlaksananya peringatan Hari Pendidikan dan Hari Aksara Internasional 1 Tk. Kota Bekasi dan Tk. Prop. Jawa Barat			-	21 Jenis lomba, 3 event	400.000.000	21 Jenis lomba, 3 event	1.600.000.000								
11	Penyelenggaraan Life Skill Bagi Warga Belajar Paket B dan C dan Masyarakat yang Kurang Mampu	Meningkatnya kemampuan kecakapan hidup Warga Belajar Paket C dan Masyarakat Kurang Mampu		132 Orang x 3 bln	500.000.000	94 Orang x 3 bln	400.000.000	94 Orang x 3 bln	400.000.000	100 Orang x 3 bln	450.000.000	130 Orang x 3 bln	500.000.000	130 Orang x 3 bln	2.250.000.000		
12	Pengendalian dan Monitoring Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Bekasi	Tersusunnya dokumen sebagai basic data pengendalian dan monitoring Lembaga Pendidikan Non Formal			-		-	15 Lembaga 2 event	150.000.000	15 Lembaga 2 event	150.000.000	10 Lembaga 2 event	150.000.000	10 Lembaga 2 event	450.000.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		di Kota Bekasi																
	13	Apresiasi GTK PAUD Dikmas Tk. Kota Bekasi dan Prop. Jabar	Terlaksananya Apresiasi GTK PAUD Dikmas Tk. Kota Bekasi dan Tk. Prop. Jawa Barat		-	2 Event	400.000.000	2 Event	1.600.000.000									
	14	Seleksi dan Diklat Calon Penilik PAUD Dikmas dan Guru Pamong SKB di Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan Penilik PAUD dan Dikmas di Kota Bekasi		-	30 orang	250.000.000	50 orang	300.000.000	50 orang	300.000.000	50 orang	300.000.000	50 orang	1.150.000.000			
	15	Kegiatan Jambore Daerah Saka Budaya Widya Bakti di PKBM dan SKB	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Kepramukaan Warga Belajar Paket C		-	50 orang	150.000.000	50 orang	600.000.000									
	16	Diklat Uji Kompetensi Instruktur LKP di Kota Bekasi	Meningkatnya kompetensi Instruktur		-	25 org	150.000.000	25 org	600.000.000									



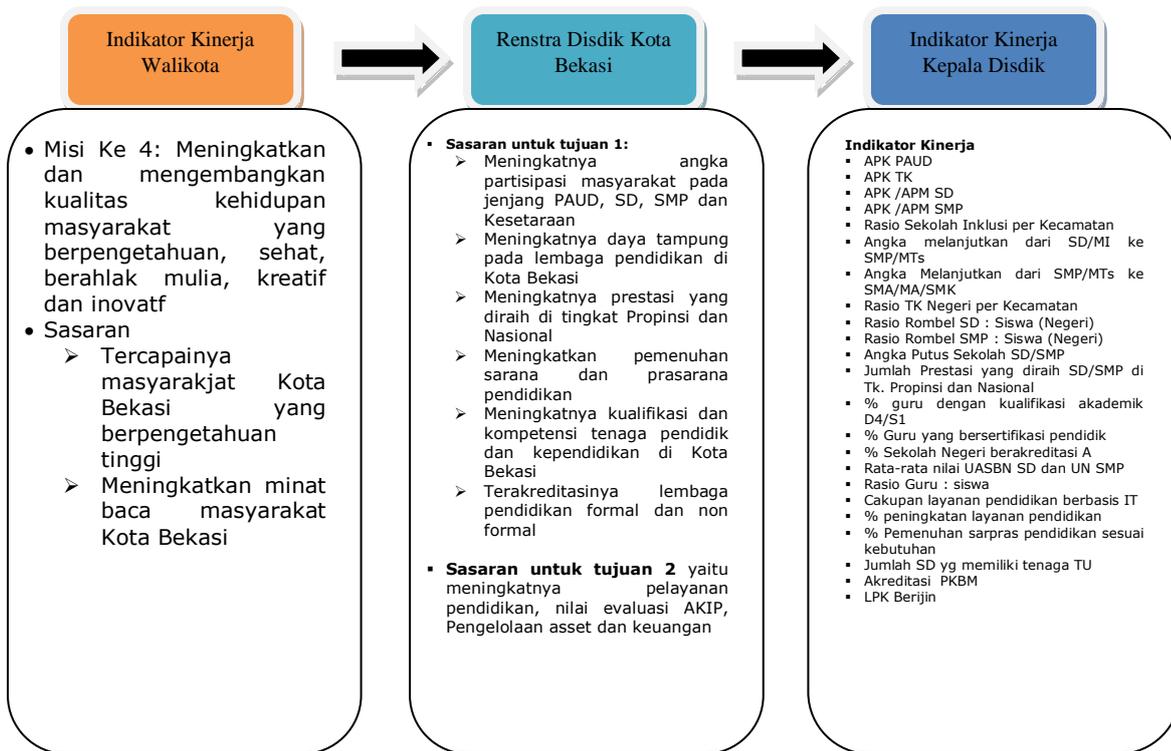
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Pendidikan Penanggungjawab	Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pendidikan				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		LKP di Kota Bekasi																
	17	Pengadaan Sarana Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer di PKBM dan SKB Se- Kota Bekasi	Terpenuhiya kebutuhan sarana komputer untuk UN BK di PKBM dan SKB Se-Kota Bekasi		-	1 SKB	400.000.000	2 PKB M	200.000.000	2 PKB M	200.000.000	2 PKB M	200.000.000	2 PKB M	1.000.000.000			
	18	Penyelenggaraan Keterampilan Bagi Warga Belajar pada SPNF SKB Kota Bekasi	Meningkatnya keterampilan warga belajar pd SPNF SKB Kota Bekasi		-	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	400.000.000			



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2019-2023 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, keterkaitan dan pohon kinerja.

Fokus indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023. Indikator kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon III dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja Walikota dan indikator kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi terlihat pada skema sebagai berikut:



Gambar 7. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2018-2023



Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan ini dirancang untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018–2023. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel 7.1 di bawah ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel	1 Meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	APK PAUD (3-6 tahun)	56	57	58	59	60
			APK SD	114	113,51	113,12	112,78	112,22
			APK SMP	96,74	96,91	97,25	97,75	98
			APK TK (5-6 tahun)	55,78	56,28	56,78	57,28	57,78
			APM SD	98,54	99	100	100	100
			APM SMP	83,93	84	84,35	84,65	84,86
		2 Meningkatnya daya tampung pada lembaga pendidikan di Kota Bekasi	Rasio SD Inklusi per Kecamatan	5	6	7	8	9
			Rasio SMP Inklusi per Kecamatan	2	3	4	5	6
			Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	86	88	90	92	94
			Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	97,75	97,86	97,97	98	98,2
			Angka Putus Sekolah SD	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
			Angka Putus Sekolah SMP	0,045	0,04	0,035	0,03	0,025
		3 Meningkatnya prestasi yang diraih di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	26	27	28	29	30
			Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	26	27	28	29	30
			Rerata USBN SD	81	82	83	84	85
			Rerata UN SMP	61,54	61,73	61,85	61,92	62
		4 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	64,65	64,71	64,85	64,9	65
		5 Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kota Bekasi	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1	70,5	70,9	71,3	71,7	72
			Persentase Guru yang bersertifikasi	52,22	52,43	52,6	52,75	52,95



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	6 Terakreditasi lembaga pendidikan Formal dan Non Formal di Kota Bekasi	Persentase lembaga formal terakreditasi	83,35	83,5	83,77	84,07	85,22
			Persentase lembaga Non Formal terakreditasi	33,7	36,6	38,5	39,22	40,82
		7 Meningkatnya pelayanan pendidikan, Nilai Evaluasi AKIP dan Pengelolaan asset dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	73	75	77	79	81
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan Umum

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018 - 2023. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam periode tahun 2018 - 2023. Mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan tugas dan fungsi, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai peran yang cukup strategis dalam mensukseskan capaian Misi ke - 3 yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;

Dalam melaksanakan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tahun 2018 - 2023 ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya dengan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh insan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan yang dimiliki, dan merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang pada akhirnya menuju kepada tercapainya Indikator Kinerja yang terdapat dalam RPJMD yang terkait dengan pelayanan urusan pendidikan di Kota Bekasi.
3. Dinas Pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan RKPD



Kota Bekasi, yang mana sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi.

4. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Pendidikan Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.
5. Mensosialisasikan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini kepada seluruh pegawai dan mitra serta stakeholder Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

8.2. Faktor Kunci Keberhasilan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tercapainya tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Renstra 2018-2023 tidaklah mudah dan harus didukung oleh berbagai macam faktor. Faktor kunci keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam bidang pelayanan urusan pendidikan secara optimal.
2. Meningkatkan disiplin, kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam mendukung pelayanan pendidikan.
4. Penyediaan dokumen Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan yang sistimatis.
5. Meningkatkan kualitas tenaga fungsional Pengawas Sekolah sebagai ujung tombak peningkatan mutu pendidikan dan aparatur lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
6. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
7. Komitmen dan dukungan dari para pimpinan dan para pengambil kebijakan dalam upaya pencapaian Renstra.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi periode Tahun 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Bekasi yang telah ditetapkan.